

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi memiliki arti kedaulatan berada ditangan rakyat, dengan menjamin hak-hak rakyat secara adil, sehingga kebebasan dan peluang dalam pemerintah diberi seluas-luasnya kepada masyarakat. Berdasarkan pandangan Abraham Lincoln (1863), Lincoln memuji kebaikan-kebaikan dari apa yang di sebut sebagai ‘pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’.¹ Artinya setiap orang yang ada dalam negara demokrasi berhak memilih dan dipilih atau memimpin dan dipimpin, dengan mengikuti pemilihan atau konflik politik secara damai tanpa takut politik balas dendam terhadap pesaing perebutan kekuasaan. Untuk mewujudkan demokrasi bisa dilakukan melalui pemilihan.

Pemilihan merupakan agenda wajib dalam negara demokrasi, karena pemilihan sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan secara berkala, sebagai rotasi pergantian kekuasaan atas dasar pilihan publik. Rakyat membentuk partai politik, Partai politik yaitu sebuah kelompok masyarakat yang diorganisasikan untuk tujuan memenangkan kekuasaan pemerintahan, melalui sarana pemilih atau yang lain.

Pemilihan ini terdiri dari dua macam yaitu secara langsung dan tidak langsung, dikatakan langsung artinya partisipasi warga secara langsung, tanpa perantara, dan terus-menerus dari warga di dalam tugas-tugas pemerintah, sedangkan yang tidak

¹ Andrew Heywood. (2014)., *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 153

langsung atau perwakilan dan terbatas dalam arti partisipasi masyarakat dalam pemerintahan bersifat jarang dan singkat, dibatasi pada aksi pemberian suara tiap beberapa tahun sekali. Di katakan tidak langsung dalam arti masyarakat tidak menyelenggarakan kekuasaan mereka sendiri, mereka sebatas memilih orang-orang yang akan berkuasa untuk kepentingan masyarakat.²

Indonesia ialah salah satu negara yang menganut demokrasi dalam sistem politiknya termasuk menjalankan pemerintahannya. Hal ini telah dijalankan sejak Indonesia merdeka, sebagai wujud dari demokrasi tersebut maka dilakukan pemilihan pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 yang diselenggarakan dengan Sistem Perwakilan Berimbang (*Proportional Representituante*) Daftar Tertutup (tidak langsung).³ Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami pergulatan hebat dari rezim ke rezim berikutnya, Soekarno dengan secara sepihak membubarkan dewan konstituante melalui Dekrit 5 Juli 1959 dan DPR melalui Perpres No. 3 Tahun 1960.

Era Reformasi juga sebagai peluang perubahan kembali pemerintahan di Indonesia. Pengkajian ulang desentralisasi sebagai wujud adanya pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan. Pemerintah pusat diberikan wewenang mengelola ditingkat pusat dan tidak boleh mencampuri urusan otonomi di berbagai daerah. Pemerintah daerah juga diberikan hak otonom mengatur daerahnya, termasuk dalam proses sirkulasi pemerintahan yang di kenal dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagai sarana mewujudkan demokrasi dalam memilih gubernur dan wakil gubernur ditingkat provinsi, walikota dan wakil walikota ditingkat kota serta bupati dan

2 *Ibid.*, hal. 158

3 Muhadam Labolo. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo, hal. 115

wakil bupati ditingkat kabupaten. Mengikuti kesuksesan Pemilu 2004, Pilkada tahun 2005 juga dilaksanakan secara langsung berdasarkan konsep *one man one vote*⁴

Lalu, demokrasi yang dilaksanakan pada pemilu langsung ataupun tidak langsung diperlukannya partisipasi politik dari masyarakat, Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.⁵

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan masyarakat pada pilkada. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi.

Pada sejarah Pemilu-pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih tidak jarang dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan Pemilu. Pemilu yang memiliki

4 Muhamam Labolo, *Op.,cit*, h. 174

5 Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Ikrar Mandriabadi, hal. 367

tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu legitimasi yang kuat atau rendah.⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu memiliki peran untuk ikut mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat, di tegaskan pada UU. No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum pada tanggal 8 ayat (1) huruf q. Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilihan Komisi Pemilihan Umum membutuhkan sebuah strategi untuk dapat menjalankan tugasnya.

Di Sumatera Selatan KPU provinsi melakukan upaya penyelenggaraan terbesar pada Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera. Karena dilakukan secara serentak mulai dari pemilihan gubernur hingga pemilihan kepala daerah sembilan kabupaten kota se Sumatera Selatan. Secara rasional, Pilkada Serentak di Sumatera Selatan yang dilaksanakan di 17 kabupaten/kota dengan rincian, 12 daerah digelar tahun 2018. Kemudian Pilkada kabupaten/kota digelar 2018 dan 52 akan dilaksanakan 2019.⁷ Upaya yang di lakukan KPU masih banyak belum diketahui masyarakat.

Dalam demokrasi satu orang satu suara sangat penting, baik orang di perjalanan, orang sakit, panyandang disabilitas, orang pinggiran dan yang lainnya. Karena suara sangat berharga menentukan legitimasi, sehingga penyelenggara pemilu KPU harus meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

6 KPU Provinsi Sumatera Selatan, *Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih KPU Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang: KPU Provinsi Sumatera Selatan, hal. 1

7 KPU Provinsi Sumatera Selatan, (2018), "Mengukir Sejarah Kepemimpinan Sumatera Selatan", Edis VI, Palembang: KPU Sumsel, h. 37

Karena demokrasi di tentukan oleh suara rakyat, dan sangat berkaitan dengan legitimasi “*semakin sedikit yang memilih semakin rendah legitimasi, semakin banyak yang memilih semakin tinggi legitimasi.*” Legitimasi sangat penting karena legitimasi awal dari segala-galanya dalam proses pelaksanaan kekuasaan dari pemimpin.

Pemimpin yang di akui dan tidak di akui sangat beda karena itu berkaitan dengan power kekuasaan politik, legitimasi terdampak dengan *pertama* kekuasaan politik, karena kekuasaan politik pemimpin rendah akan mengakibatkan kewenangan atau kebijakan dari pemimpin tersebut membuat masyarakat biasa saja tidak ada apresiasi dari masyarakat.

Kedua berdampak kepada kepada negara, contoh kita tidak mengakui Gubernur Sumatera Selatan yang sekarang berarti kita juga tidak mengakui Provinsi Sumatera Selatan. Pemimpin yang tidak diakui berdampak luas sampai membuat masalah seperti manipulasi, korupsi dan hal buruk lain. Hal tersebut terjadi karena pemimpin itu tidak di hargai oleh bawahannya sehingga membuat bawahan berbuat seenaknya saja. Tingkat partisipasi masyarakat sangat penting untuk legitimasi pemimpin, karena kalau rendahnya partisipasi masyarakat membuat pemimpin tidak legitimasi sehingga sangat berdampak buruk bagi semua sistem pelaksanaan pemerintahan pemimpin tersebut.

Dari kenyataan tersebut, maka dilakukan untuk mengetahui apa dan bagaimana upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Hal ini yang mendasari peneliti sehingga berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang “**Upaya Komisi Pemilihan**

Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 ”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan rincian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 ?
2. Bagaimana tanggapan KPU dan masyarakat terhadap Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019
2. Untuk mengetahui tanggapan KPU Provinsi dan masyarakat terhadap Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berharap dapat bermanfaat bagi kajian Ilmu Politik. Diharapkan mampu menjadikan acuan dalam penelitian di masa depan terkait berlangsungnya demokrasi di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai perluasan mengenai demokrasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan lebih bisa meningkatkan lagi partisipasi politik masyarakat pada Pemilu, KPU harus mencari strategi lebih baik untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu kedepannya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu:

Tauchid Noor dalam “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran KPU meningkatkan partisipasi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum merupakan

metamorfosis dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan peran KPU sesuai dengan wewenang yang ada maka KPU harus menjalankan perannya dalam pemilu sesuai undang-undang yaitu dengan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat dan stakeholder. Dalam interaksi sosial tersebut terdapat peran yang signifikan terhadap partisipasi. Adapun peran KPU yang diimplementasikan dalam pemilu tersebut sebagai berikut antara lain⁸ :

- a. Mengadakan sosialisasi dengan menggunakan media komunikasi multi jalur pada setiap tahapannya secara tepat, baik melalui media cetak, elektronik maupun melalui forum-forum organisasi nonformal dalam masyarakat, misalnya radio, koran, kelompok tahlil, pengajian, ibu-ibu PKK, dan sebagainya.
- b. Fungsionalisasi institusi pemerintahan secara proporsional di tingkat kelurahan, misalnya dengan memberdayakan lembaga tingkat desa kelurahan, seperti desa kelurahan, RW, dan RT.
- c. Mampu membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dengan desk pemilu/pemerintah dan pemerintah daerah, media massa, dan instansi terkait di daerah, dengan kerja sama dan koordinasi tersebut diharapkan terjadi komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
- d. Konsisten dalam pelaksanaan regulasi sehingga KPU dapat menempatkan dirinya secara netral, independen, proporsional, dan patuh sesuai dengan

8 Tauchid Noor, *Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1, 2019, hal. 59

peraturan perundang-undangan sehingga KPU dapat menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu.

M. Yusuf A.R dalam “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik”. Skripsi atau jurnal ini menjelaskan peran KPU dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. KPU secara undang-undang memiliki wewenang untuk menyosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat.⁹

Untuk menjalankan tugas di bidang sosialisasi tersebut, secara struktural KPU telah menjangkau semua tingkatan wilayah dan geografis karena di setiap wilayah dibentuk kepanjangan tangan KPU. Pada wilayah provinsi terdapat KPU Provinsi, di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk KPUD kabupaten/kota, di tingkat wilayah Kecamatan dibentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa/kelurahan terdapat PPS (Panitia pemungutan Suara).

Pada saat pemungutan suara, di tiap-tiap TPS terdapat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Sedangkan untuk pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN (Panitia Pemungutan Luar Negeri). Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan Pemilu di antaranya yaitu: manfaat pemilu, nama-nama peserta pemilu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara

9 M. Yusuf A.R, (2010), *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*, Jurnal Ganec Swara, Vol. 4, No, 1, hal 13

menarik, informative, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya.

Nicolas Hariyanto dalam “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018” dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut¹⁰ :

1. Analisis visi dan misi KPU Provinsi Sumatera Utara Isu dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT. Adapun komponen-komponen S-W-O-T dalam KPU Provinsi Sumatera Utara adalah;
 - a. Strength (S), yang menjadi kekuatan KPU Provinsi Sumatera Utara adalah memiliki SDM yang mencukupi; memiliki regulasi; dan memiliki anggaran yang memadai.
 - b. Weakness (W), yang menjadi kelemahan KPU Provinsi Sumatera Utara adalah tidak adanya divisi khusus di KPU Provinsi Sumatera Utara yang membidangi partisipasi masyarakat dan sosialisasi politik.
 - c. Opportunity (O), yang menjadi peluang KPU Provinsi Sumatera Utara adalah pemanfaatan teknologi informasi dan bekerjasama dengan 9 universitas dan SMA di Sumatera Utara.

10 Nicolas Hariyanto, (2018), *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*, Medan: Universitas Sumatera Utara, hal. 96

d. Threat (T), yang menjadi ancaman di KPU Provinsi Sumatera Utara adalah apatisme masyarakat dan daftar pemilih tetap yang tidak akurat.

2. Strategi KPU Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dirumuskan menggunakan matriks SWOT yang menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategi. Alternatif-alternatif strategi tersebut yaitu:

- a. Strategi S.O dengan kombinasi kekuatan dan peluang yang dimiliki KPU Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa KPU dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku. Selain itu SDM di KPU juga dituntut untuk melek teknologi sehingga dapat menggunakan media sosial sebagai peluang untuk penyebaran informasi secara luas. Disamping itu anggaran yang dimiliki KPU dapat digunakan secara efektif dengan melakukan kerjasama bersama 9 universitas dan SMA di Sumatera Utara sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat
- b. Strategi S.T dengan kombinasi kekuatan dan ancaman yang dimiliki KPU Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa KPU untuk meminimalisir tingkat apatisme masyarakat dengan meningkatkan kinerja kelompok peduli pemilu. Kelompok peduli pemilu ini melakukan pendidikan politik kepada kelompok masyarakat seperti kelompok perempuan, disabilitas dan kelompok lainnya. Dibentuknya Kelompok peduli pemilu ini akan dapat mengefisienkan waktu dan dana KPU sebab kelompok ini yang akan melakukan sosialisasi kepada beberapa kelompok masyarakat.

- c. Strategi W.O untuk meminimalisir tidak adanya divisi khusus yang membidangi partisipasi masyarakat dan sosialisasi masyarakat KPU menggunakan peluang yang ada yaitu memaksimalkan kinerja kelompok peduli pemilu, kelompok ini sebagai perpanjangan tangan KPU untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan untuk menunjang agar sosialisasi semakin efektif KPU juga memaksimalkan pemanfaatan media sosial sebagai alat sosialisasi yang efektif, lalu SDM yang ada di KPU juga dapat di mobilisasi untuk terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
- d. Strategi W.T merupakan strategi yang bersifat defensif dan ditunjukan untuk meminimalkan kelemahan. Ada 2 strategi yaitu meningkatkan koordinasi anggota KPU untuk meningkatkan parmas dan meningkatkan peran PPDP sebagai petugas pencocokan dan penelitian “coklit”.

3. Terdapat 3 bentuk kegiatan yang dilakukan KPU sebagai bentuk strategi meningkatkan partisipasi masyarakat.

- a. Forum Warga

KPU turun langsung kepada masyarakat ditingkat RT/RW untuk memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat, tidak lagi hanya mengundang tokoh masyarakat dan menugaskannya memberikan sosialisasi. Cara ini diharapkan dapat memperkecil sifat apatisisme masyarakat di tingkat RT/RW.

b. Komunitas Peduli Pemilu

Komunitas ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok perempuan, tenaga pengajar, disabilitas dan lain sebagainya. Orang-orang yang terdiri dari komunitas ini diharapkan membentuk komunitas lagi di sekitar wilayahnya atau dengan kelompoknya dan memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dan masyarakat sekitar.

c. Rumah Pintar Pemilu

Rumah pintar pemilu ini dibentuk untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk belajar bagaimana sejarah terbentuknya KPU, tata cara pelaksanaan pemungutan suara, dan informasi seputar kepemiluan. Dirumah pintar pemilu juga terdapat contoh alat kelengkapan memilih, maket-maket dan alat peraga lainnya. Rumah pintar pemilu ini terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi oleh kelompok maupun perseorangan. Penyediaan fasilitas pembelajaran kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan.

d. Ceramah oleh Komisioner KPU pada Saat Upacara

Komisioner KPU tingkat Kab/Kota setiap senin memberikan ceramah kepada para siswa/siswi pada saat upacara, ceramah yang diberikan menyinggung tentang kepemiluan, diharapkan para siswa dapat memahami sedari dini tentang kepemiluan dan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas.

e. memaksimalkan media sosial untuk sosialisasi

KPU untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan media sosial. Banyaknya pengguna aktif media sosial menjadi latar belakang KPU memakai media

sosial untuk menyebarkan informasi terkait pemilihan. Penggunaan media sosial juga dapat menghemat biaya sosialisasi.

f. KPU melakukan kerjasama dengan universitas dan SMA yang ada di Sumatera Utara, kerjasama ini berbentuk membebaskan biaya fasilitas dan narasumber jika organisasi di Universitas atau SMA mengadakan acara yang bertema pemilihan. Dibalik pembebasan tersebut KPU dapat memanfaatkan peluang untuk memberikan pendidikan politik bagi siswa ataupun mahasiswa dan memberikan sosialisasi pemilihan

Maya Yuliantina dalam “Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan” dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut¹¹ :

Tingkat kesadaran politik masyarakat Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan persentase hasil analisis data masih di tingkatan atau indikator pengetahuan yakni 29,3%. Masyarakat mengetahui kesadaran politik persentase masyarakat dalam indikator pemahaman, 32,3% masyarakat tidak memahami kesadaran politik, di tingkatan selanjutnya 43,4% masyarakat cukup cukup memiliki kesadaran politik, lalu 48,4% masyarakat tidak mempunyai tindakan dalam kesadaran politik. Nilai rata-rata yang dihasilkan untuk kesadaran politik adalah 2,57 yang termasuk dalam kategori rendah. Dengan Persentase yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kesadaran politik maka dapat dikategorikan bahwa kesadaran politik masyarakat di Desa Hajimena rendah.

11 Maya Yuliantina, (2016), *Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Hal. 178

Novendi Setiawan dalam “Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015” dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut¹²:

1. Perencanaan strategi KPU Bantul dengan cara pertama identifikasi misi KPU Bantul, yang kedua analisis lingkungan strategi dengan analisis SWOT, dan yang ketiga analisis isu strategi.
2. Hasil analisis isu strategi berdasarkan SWOT sebagai berikut : Strategi S.O (Strength / Opportunities) yang didapat dari hasil analisis kekuatan dan peluang organisasi KPU Bantul yaitu meningkatkan kualitas kerjasama antar anggota KPU maupun dari luar anggota KPU, menjalankan tugas KPU sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta anggota KPU untuk memaksimalkan kemampuan berteknologi internet. Dengan strategi tersebut KPU dapat memanfaatkan kekuatan organisasi untuk mengejar peluang yang ada. Strategi S.T (Strengths / Threats) yang didapat dari hasil analisis kekuatan dan peluang organisasi KPU Bantul , meningkatkan pendidikan berpolitik kepada masyarakat dan mengefektifkan kinerja tim yang bertugas dalam seksi sosialisasi masyarakat. Strategi tersebut digunakan untuk memperkecil dampak ancaman yang datang dari luar. Strategi W.O (Weakness / Opportunities) yang didapat dari hasil analisis kekuatan dan peluang organisasi KPU Bantul yaitu meningkatkan kerjasama dari organisasi-organisasi terkait, pemanfaatan sarana dan prasarana dengan baik agar biaya bisa diminimalisir, mengadakan pelatihan atau diklat

12 Novendi Setiawan, (2015), *Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

agar sosialisasi lebih berkualitas. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi W.T (Weakness / Thereats) yang didapat dari hasil analisis kekuatan dan peluang organisasi KPU Bantul yaitu meningkatkan koordinasi anggota KPU untuk bersosialisasi kepada masyarakat, memaksimalkan program KPU dengan meminimalkan biaya, meningkatkan mutu sosialisasi kepada masyarakat.

3. Strategi KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dipilkada 2015 antara lain : Memaksimalkan kemampuan media elektronik dan media internet untuk bersosialisasi, Meningkatkan kerjasama dari organisasi terkait untuk bersosialisasi, dan Validasi Data Pemilih

E. Kerangka Teori

Konsep Legitimasi (*legitimacy* atau keabsahan) yang paling penting dalam sistem politik. Keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut di hormati. Legitimasi biasanya akan terkait dengan masalah hukum dan penerapan undang-undang yang dibuat berdasarkan putusan dalam peradilan, di mana hal ini akan dijadikan sebagai ukuran bagaimana keputusan tersebut diterima dan diakui *kesahinannya* di dalam masyarakat luas.

Adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin bisa memicu kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Hal tersebut juga dipercaya dapat membuka kesempatan yang semakin lebar bagi pemerintahan untuk tidak hanya

memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang akan ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan itu sendiri yang pada umumnya menjadi tugas utama dari sebuah pemerintahan. Untuk memahami konsep legitimasi dapat ditinjau yaitu teori legitimasi yaitu sebagai berikut :

a. Teori Legitimasi Max Waber

”Rule without legitimacy is fundamentally not rule, but rather a stage in the mere exercise of power with little prospect of permanence. And so the state also requires a legitimating foundation that can provide validity for its order”¹³

“Aturan tanpa legitimasi secara fundamental bukanlah aturan, melainkan sebuah tahapan pelaksanaan kekuasaan semata dengan sedikit prospek keberlanjutan. Maka negara membutuhkan legitimasi sebagai dasar bagi pembenaran kekuasaan dan tatananya”

Legitimasi adalah pemerintahan dari rakyat dan dipilih oleh rakyat dan kemudian digunakan untuk rakyat. Dengan kata lain, legitimasi berkaitan erat dengan proses sosial, beda halnya dengan legalitas yang berhubungan dengan aspek hukum. Proses pemilihan akan menentukan apakah pemimpin yang terpilih memenuhi unsur legalitas dan legitimasi. Pemilu tidak hanya bertujuan memilih pemimpin politik, proses itu tidak hanya menjadi pintu masuk untuk proses pembangunan politik dan demokrasi selanjutnya. Selain sebagai tolok ukur perkembangan demokrasi pemilu juga menguji daya legitimasi seseorang yang menjadi pemimpin di hari esok.

b. Legitimasi Kekuasaan

Sebagaimana diungkapkan Haryanto dalam Nursam bahwa kekuasaan dapat diartikan Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga orang lain menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh

13 Andreas Anter, (2014), *Max Weber Theory Of The Modern State*, Terjemahan edisi Jerman: Badan Lisensi Hk Cipta, hal 52

orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Namun dalam mempelajari kehidupan politik, kekuasaan tidak hanya sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain akan tetapi juga dipandang sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Suatu kekuasaan akan memunculkan sebuah kewenangan. Laswell dan Kaplan menyatakan bahwa wewenang (authority) merupakan sebuah kekuasaan formal, atau dengan kata lain wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimasi.¹⁴

Kewenangan seseorang belum lengkap jika seseorang belum mendapatkan legitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Secara garis besar legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, hubungan itu lebih ditentukan oleh yang dipimpin karena penerimaan dan pengakuan atas kewenangan hanya berasal dari yang diperintah.

Secara umum alasan utama mengapa legitimasi menjadi penting bagi pemimpin pemerintahan. Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dari kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum. Pemerintah yang memiliki legitimasi akan lebih mudah mengatasi permasalahan daripada pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi.

14 *Ibid.*, hal. 20

konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan hak yang mengikat masyarakat ataukah tidak. Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

c. Legitimasi Demokrasi

Pembahasan-pembahasan modern tentang legitimasi didominasi oleh hubungan dengan demokrasi, begitu dominan sehingga legitimasi demokrasi sekarang secara luas diterima sebagai satu-satunya bentuk legitimasi yang bermakna. Klaim sebuah organisasi politik di anggap absah karenanya secara instrinsik dikaitkan dengan klaim bahwa dia demokrasi. Bagian utama berikut mengkaji model-model kekuasaan demokratis dan debat-debat tentang bagaimana demokrasi berjalan dalam praktiknya.

Sifat dari hubungan demokrasi dan legitimasi, Demokrasi dapat di anggap mendukung demokrasi ada 3 cara. *Pertama*, melalui persetujuan. Meski pun warga tidak secara eksplisit memberikan persetujuan mereka untuk diperintah, yang memberi otoritas politik sebuah 'hak memerintah' yang formal, mereka melakukannya secara implisit tiap kali mereka berpartisipasi dalam proses politik. Dalam hal ini, demokrasi menyokong legitimasi dengan memperluas kesempatan-kesempatan bagi partisipasi politik, yang paling penting melakukan aksi voting, dan juga melalui aktivitas-aktivitas

seperti bergabung dalam partai politik atau kelompok kepentingan atau terlibat dalam protes atau demonstrasi.

Partisipasi politik, dalam pengertian ini mengikat pemerintah dan rakyat, mendorong rakyat untuk melihat aturan-aturan main politik sebagai absah dan menerima bahwa mereka memiliki sebuah kewajiban untuk menghormati dan mematuhi perintah.

Kedua, esensi dari pemerintahan demokratis adalah sebuah proses kompromi, konsiliasi dan negosiasi, melalui mana berbagai kepentingan dan kelompok mendapatkan cara untuk hidup bersama dalam keadaan relatif damai, daripada saling bersaing dengan menggunakan kekuatan dari senjata. *Ketiga*, demokrasi berfungsi sebagai sistem umpan-balik yang cenderung mendukung stabilitas politik jangka-panjang, karena ia membuat 'output' dari pemerintahan politik selaras dengan 'input' atau tekanan atau tuntutan yang dikenakan kepadanya.

Bahkan meskipun demokrasi telah diterima sebagai mekanisme utama dalam menyokong legitimasi, terdapat alasan untuk menganggap bahwa efektivitasnya tidak tentu. Ini terlihat dalam rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan-pemilihan dan menurunnya keanggotaan dalam partai-partai politik.

Dari beragam konsep di atas, dapat disimpulkan rumusan dari legitimasi bahwa konsep legitimasi berkaitan dengan konsep kekuasaan dan kewenangan yang menekankan hubungan antar pemimpin dan yang dipimpin. Dalam hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, titik tekanan dari legitimasi adalah keabsahan. Keabsahan

disini selalu diartikan sebagai sifat normatif. Mempertanyakan keabsahan wewenang kekuasaan berarti legitimasi selalu berkaitan dengan sikap masyarakat

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran di atas mengenai teori legitimasi tersebut, penelitian berjudul Upaya KPU Provinsi dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, akan diteliti menggunakan Teori Legitimasi Max Weber, karena teori tersebut paling tepat untuk menjelaskan atau menggambarkan Upaya KPU Provinsi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sangat penting untuk memelihara legitimasi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian berjudul Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 merupakan penelitian dengan tipe penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang termasuk survei dan pencarian fakta pertanyaan dari jenis yang berbeda dan tujuan dari penelitian ini ialah menggambarkan keadaan seperti yang terjadi saat ini, sehingga penelitian tidak memiliki kontrol atau variabel tetapi hanya bisa melaporkan apa yang telah terjadi.¹⁵ Penelitian ini akan diteliti dengan melakukan pengolahan, penyajian dan analisis data yang diperoleh dari lapangan mengenai Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat Sumatera Selatan pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

15 C.R Kothari, (1990). *Research Methodologi, Methods and Techniques (Second Revised Edition)*, India: Age International, hal. 2-3

Dalam bidang penelitian terdapat dua macam pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah Pendekatan yang digunakan menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informal) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu melihat, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Pemaknaan ini merupakan hasil interaksi sosialnya¹⁶.

Letak kualitatif dalam penelitian ini dimana upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur Sumatera Selatan tahun 2019, sehingga terdapat tanggapan masyarakat terhadap upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan. Melalui pendekatan ini peneliti akan menggumpulkan data dari upaya KPU Provinsi dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dan melihat tanggapan masyarakat terhadap upaya KPU Provinsi yang sudah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, Selanjutnya menggambarkan, dan menganalisis hasil dari Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Sumatera Selatan pada Pilkada Serentak 2018 dan pemilu 2019.

2. Data dan Sumber Data

Data dan jenis data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

¹⁶ Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 10

a. Data Primer

Data primer adalah sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam Upaya KPU Provinsi dalam meningkatkan partisipasi pemilih, seperti anggota KPU Sumatera Selatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum marginal, penyandang disabilitas, mahasiswa, ibu-ibu, dan panitia penyelenggara pemilu. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah dokumen, foto, rekaman pernyataan, dan lainnya yang berhubungan dengan Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang bagi data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita online, laporan-laporan, tulisan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan upaya KPU Provinsi dalam meningkatkan partisipasi pemilih, untuk memperkuat dan menunjang data primer tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah KPU Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat di Sumatera Selatan yang berfokus pada pemilu Sumatera Selatan 2018, dengan demikian yang menjadi perhatian ialah orang-orang yang terlibat dalam Upaya KPU Provinsi dalam Meningkatkan Partisipasi politik masyarakat Sumatera Selatan pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Oleh karena itu, subjek penelitian yang merupakan bagian dari upaya KPU Provinsi dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum marginal, penyandang disabilitas, mahasiswa, dan ibu-ibu ada sasaran partisipasi dan sosialisasi pemilu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan observasi:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis sebuah objek apapun yang ingin diobservasi, dilakukan dengan terjun langsung dilapangan sehingga diperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁷ Peneliti langsung terjun kelapangan yang terlibat langsung dan dengan upaya yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan samapai mengetahui pada tingkat mana partisipasi masyarakat dalam upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terjun langsung ke lapangan peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan dan langsung menemui warga yang ikut berpartisipasi untuk melakukan wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden)¹⁸. Peneliti

¹⁷ *Ibid.*, hal. 175

¹⁸ *Ibid.*, hal. 362

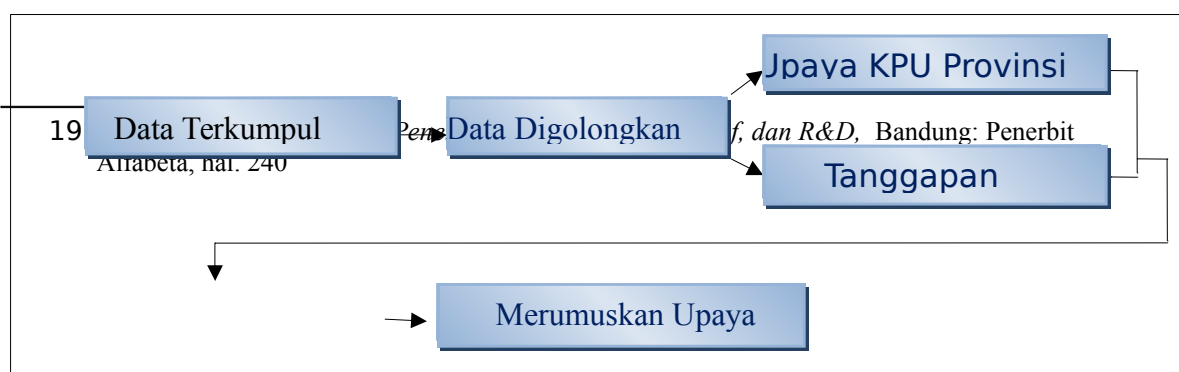
menemui orang-orang yang terlibat langsung dalam Upaya KPU Provinsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum marginal, penyandang disabilitas, mahasiswa, ibu-ibu, dan panitia penyelenggara pemilu ketika melakukan wawancara peneliti juga melakukan perekaman untuk mendokumentasikan pertanyaan-pertanyaan dari informan yang diwawancarai. Setelah melakukan wawancara responden kemudian penelitian akan mengamati dan observasi terhadap informasi atau keterangan yang didapatkan dari masing-masing responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.¹⁹ Dokumen yang di keluarkan langsung oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan yang berbentuk, modul, jurnal, laporan, foto, dan lainnya. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Bagan 1.1

Teknik Pengumpulan Data



Interpretasi

Sumber: Diolah Peneliti

5. Teknik Analisa Data

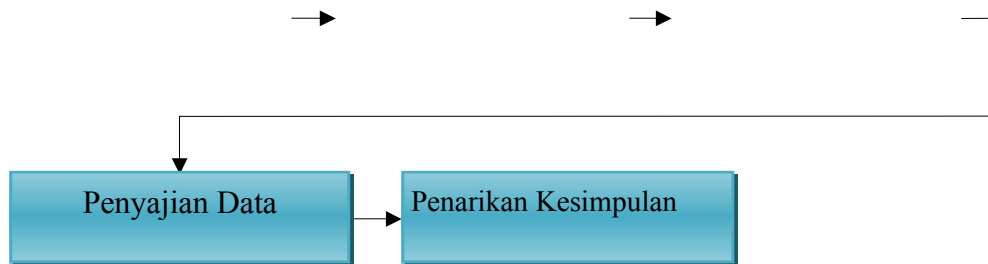
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif datanya tidak dapat di hitung dan berwujud sehinga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka.

Disamping itu, penelitian ini bersifat deskripsi yang bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Data-data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian disusun, dianalisis dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan di teliti.

Bagan 1.2

Teknik Analisa Data





6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mendapat gambaran yang terperinci dan untuk mempermudah isi dari pada skripsi ini, sehingga penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 4 bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi masalah melalui rumusan masalah. Termasuk pula dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan lokasi penelitian yang digunakan.

Bab II: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran dari lokasi penelitian di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Bab III: Analisis Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Hasil dan pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, data dan informasi di analisis secara sistematis berdasarkan penelitian yang dilakukan

Bab IV: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, lalu berisikan saran-saran yang akan diharapkan memberi manfaat bagi lembaga yang terkait juga kepada penulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Lokasi Penelitian yang berjudul Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan, yang berfokus pada peristiwa Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

A. Sumatera Selatan

1. Letak Geografis

Sumatera Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 79 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 1°-4' Lintang Selatan dan antara 102°-106' Bujur Timur. Luas wilayah Sumatera Selatan adalah berupa daratan seluas 87.421,24 km². Secara geografis letak Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi
- b. Sebelah Tiumr : Berbatasan dengan Provinsi Bangka-Belitung
- c. Sebelah barat : Berbatasan dengan Provinsi Lampung
- d. Sebelah Selatan: Perbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 wilayah kabupaten dan empat kota, yaitu: Ogan Koemring Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi banyuasin, Banyuasin, OKU Selatan, OKU Tiur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Pali, Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Serta Kota Lubuk Linggau. 13 kabupaen dan 4 kota tersebut memiliki luas wilayah sebagai berikut:

²⁰ Sumatera Selata Dalam Angka Tahun 2018, 2018, h. 5

Tabel 2.1
Luas Setiap Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah
1	Ogan Komering Ulu	3.747,77 km ²
2	Ogan Komering Ilir	17.086,39 km ²
3	Muara Enim	6.901,36 km ²
4	Lahat	4.297,12 km ²
5	Musi Rawas	6.330,53 km ²
6	Banyuasin	12.361,43 km ²
7	Musi Banyuasin	14.530,36 km ²
8	OKU Selatan	4.544,18 km ²
9	OKU Timur	3.397,10 km ²
10	Ogan Ilir	2.411,24 km ²
11	Empat Lawang	2.312,20 km ²
12	Pali	1.844,71 km ²
13	Musi Rawas Utara	5.836,70 km ²
14	Kota Palembang	363,68 km ²
15	Kota Prabumulih	458,11 km ²
16	Kota Pagar Alam	632,80 km ²
17	Kota Lubuk Linggau	365,49 km ²
Jumlah		87.421,24 km²

Sumber: Diolah Dari Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2018
Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di provinsi

Sumatera Selatan terdiri dari:²¹

0 m – 25 m = 23,5 %

26 m – 50 m = 17,7 %

51 m – 100 m = 35,3 %

101 m keatas = 23,5 %

Tabel 2.2
Jarak Ibukota Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota

No	Ibukota Provinsi	Kabupaten/kota	Jarak
----	------------------	----------------	-------

²¹ Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2018, 2018, h. 5-6

1	Palembang	Ogan Komering Ulu	221 km
2	Palembang	Ogan Komering Ilir	120 km
3	Palembang	Muara Enim	220 km
4	Palembang	Lahat	240 km
5	Palembang	Musi Rawas	360 km
6	Palembang	Musi Banyuasin	120 km
7	Palembang	Banyuasin	35 km
8	Palembang	OKU Selatan	280 km
9	Palembang	OKU Timur	261 km
10	Palembang	Ogan Ilir	35 km
11	Palembang	Empat Lawang	360 km
12	Palembang	PALI	160 km
13	Palembang	Musi Rawas Utara	390 km
14	Palembang	Prabumulih	95 km
15	Palembang	Pagar Alam	460 km
16	Palembang	Lubuk Linggau	260 km

Sumber: Diolah Dari Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2018

2. Pendudukan

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 8.266.983 jiwa yang terdiri atas 4.200.735 jiwa penduduk laki-laki dan 4.066.248 jiwa penduduk perempuan. Di bandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,44 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahu 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,31.

Tabel 2.3
Penduduk Tahun 2018 Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Ogan Komering Ulu	183.416	175.676	359.092
2	Ogan Komering Ilir	413.598	395.605	809.203
3	Muara Enim	314.803	303.959	618.762
4	Lahat	204.875	196.619	401.494
5	Musi rawas	201.807	192.577	394.384
6	Musi Banyuasin	322.367	307.424	629.791

7	Banyuasin	245.088	408.537	833.625
8	OKU Selatan	184894	168.032	352.926
9	OKU Timur	338.657	324.824	663.481
10	Ogan Ilir	210.609	209.164	419.773
11	Empat Lawang	124.531	119.781	244.312
12	PALI	92.918	91.753	184.671
13	Musi rawas Utara	94.506	93.129	187.635
14	Palembang	813.709	809.390	1.623.099
15	Prabumulih	91.827	90.301	182.128
16	Pagar Alam	69.871	66.734	136.605
17	Lubuk Linggau	113.259	112.743	226.002
Jumlah		4.200.735	4.066.248	8.266.983

Sumber: Diolah Dari Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2018

3. Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019

Sumatera Selatan telah melaksanakan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 pada kedua pelaksanaan tersebut terjadi peningkatan partisipasi masyarakat di Sumatera Selatan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Persentase Partisipasi pada Pilkada Serentak 2018
Di Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilih	
		Jumlah	Persentase (%)
1	Banyuasin	405.815	69,59
2	Empat Lawang	139.468	69,35
3	Lubuk Linggau	114.798	71,29
4	Pagar Alam	86.435	82,35
5	Palembang	782.992	67,02
6	Prabumulih	96.727	74,28
7	Lahat	220.399	73,39
8	Muara Enim	300.835	72,93
9	Musi Banyuasin	275.863	63,06
10	Musi Rawas	167.350	59,60
11	Musi Rawas Utara	79.045	54,86
12	Ogan Ilir	192.343	67,67
13	Ogan Komering Ilir	374.688	75,05
14	Ogan Koering Ulu	163.596	65,32
15	Ogan Komering Ulu Selatan	172.369	67,50
16	Ogan Komering Ulu Timur	356.666	77,61

17	PALI	81.309	66,20
Jumlah		4.010.698	69,20

Sumber: KPU Sumatera Selatan

Tabel 2.5
Persentase Partisipasi pada Pemilu Serentak 2019
Di Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Presiden & Wakil Presiden	DPR RI	DPD RI	DPRD Provinsi
1	Banyuasin	78,04	78,04	78,04	78,04
2	Empat Lawang	81,48	81,48	81,48	81,48
3	Lubuk Linggau	78,41	78,33	78,34	78,41
4	Pagar Alam	85,20	85,14	85,17	85,13
5	Palembang	80,93	80,93	80,92	80,92
6	Prabumulih	82,83	82,56	82,63	82,59
7	Lahat	83,92	83,86	83,87	83,86
8	Muara Enim	82,96	82,83	83,10	83,13
9	Musi Banyuasin	79,28	79,17	79,19	79,15
10	Musi rawas	83,13	83,09	83,10	83,13
11	Musi rawas Utara	82,16	82,13	82,14	82,16
12	Ogan Ilir	82,38	82,06	82,08	82,00
13	Ogan Komering Ilir	80,53	80,35	80,46	80,33
14	Ogan Komering Ulu	81,98	81,91	81,93	81,91
15	Ogan Komering Ulu Selatan	84,05	84,05	84,05	84,05
16	Ogan Komering Ulu Timur	83,27	83,23	83,24	83,04
17	PALI	83,04	83,04	83,04	83,04
Jumlah		81,47	81,40	81,42	81,40

Sumber: KPU Sumatera Selata

B. Komisi Pemilihan Umum

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, perlu diadakan pemilihan umum untuk menentukan siapa pemimpin yang akan memegang dan mengendalikan kekuasaan. Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana

mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dalam pemerintah Negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum hadir sebagai wadah untuk melaksanakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, antara lain adalah pemilihan umum presiden beserta wakil presiden, pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, maupun DPRD, dan untuk pemilihan umum kepala daerah beserta wakil kepala daerah.

Dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggaraan pemilu, sebagai penyelenggara pemilu, KPU diuntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara keberadaan pemilu terdapat dalam pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu diatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas

secara bersinambungan meskipun di batasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tanggungjawab KPU secara “yuridis formal” adalah dalam hal penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggungjawab moral yang lebih besar. Tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Adapun tujuan nasional Indonesia adalah masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Hal ini disebabkan karena pemilu adalah titik awal dan kunci strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang betul-betul pro-rakyat sebagai pemilik bangsa dan negara. Keberhasilan KPU dalam melaksanakan asas pemilu “Luber Jurdil” (langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) akan ikut mendorong terciptanya pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

C. KPU Provinsi Sumatera Selatan

Salah satu kebijakan dalam bidang politik dalam negeri yang tercantum dalam Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 adalah “menyelenggarakan Pemilihan Umum secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan beradab yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Independen dan Non Partisipan selambat-lambatnya pada tahun 2004”.

Mengingat pemilihan umum merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun secara kontinu, maka diperlukan institusi yang mempunyai wewenang secara khusus dalam menangani pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Institusi tersebut bersifat tetap, nasional dan mandiri.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka pemerintahan menyusun langkah-langkah persiapan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu mula dari tingkat pemerintahan pusat hingga pemerintahan kabupaten/kota. Implikasi langkah persiapan pemerintah tersebut adalah:

1. Menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Pentapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2000.

3. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Di provinsi, Kabupaten/kota.

Pembentukan perwakilan sekretariat umum KPU (PS-KPU) di Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada kappres Nomor 67 Tahun 2002 dan keputusan menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002. Dengan demikian secara yuridis, terhitung tanggal 9 Oktober 2002, Perwakilan Sekretariat KPU Provinsi telah terbentuk bersamaan dengan 30 (tiga puluh) Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten serta 88 (delapan puluh delapan) Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kota diseluruh Indonesia, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka struktur organisasi Perwakilan Sekretaris KPU di Provinsi dan Kabupaten/kota mengalami perubahan nomenklatur dan struktural organisasi tersebut diruangkan dalam Keputusan KPU Nomor 67 tahun 2003. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Ps. Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi beranggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah berganti kepemimpinan sebanyak 4 (empat) periode. Berikut adalah ketua dan anggota KPU Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang.

Periode *pertama* tahun 2003-2008 beranggotakan H. Maramis, SH., M.Hum (Ketua); Dra. Hj. Fauziah, M.Si (anggota); DR. Drs. Ardiyah Saptawan, M.Si (anggota);

Rachmat Setiawan, SH (anggota); Drs. H. Joko Siswanto, M.Si (anggota); Dra. Lis Hapsari Prihatini, M.Si (anggota). Periode *kedua* 2008-2013 beranggotakan Drs. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag Ketua); Dra. Kelly Mariana (anggota); Herlambang, S.H, M.H (anggota); Drs. Ong Berlian, M.M (anggota); Chandra Puspa Mirza, SH., M.Hum (anggota)

Periode *Ketiga* 2013-2018 beranggotakan H. Aspahani, SE., Ak., M.M., CA (Ketua; Liza Lizuarni, SE., M.Si (anggota); Heny Susantih, S.pd., M.Si (anggota); Alexander Abdullah, SH., M.Hum (anggota); Ahmad Naafi, SH., M.Kn (anggota). Periode *keempat* 2018-sekarang beranggotakan Dra. Kelly Mariana (Ketua); Hendri Daya Putra, S.Ag (anggota); Amrah Muslimin, S.E., M.Si (anggota); Hepriyadi, S.H., M.H (anggota); Hendri Almawijaya, S.Pd., M.Pd (anggota).

D. Visi dan Misi KPU Provinsi Sumatera Selatan

1. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.

2. Misi

Membangun SDM yang berkompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional :

- 1) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 3) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 4) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- 5) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 6) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesible.²²

E. Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Sumatera Selatan

a. Tugas KPU Provinsi Sumatera Selatan

Dalam Pasal 9 UU No, 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.

²² Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada KPU.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
6. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
7. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkan berdasarkan berita secara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/Kota.
8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
9. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
10. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilih di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.

11. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Banwaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan penyelenggaraan pemilu.
12. Mengenaikan sanksi administrasi dan menon-aktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretaris KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Banwaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyenggarakan sosialisasi penyelenggara Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Tugas dan wawenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota.

4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu pada pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU.
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten/Kota.
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
8. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan penyelenggaraan pemilu.
9. Mengenaikan sanksi administrasi dan menon-aktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggara pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

1. Merencanakan Program, anggaran dan jadwal pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
5. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
6. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.

7. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan.
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU.
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.
11. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
12. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya.
13. Melaporkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kepada KPU.
14. Memeriksa pengaduan dan laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota

b. Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Selatan

Kewajiban KPU Provinsi:

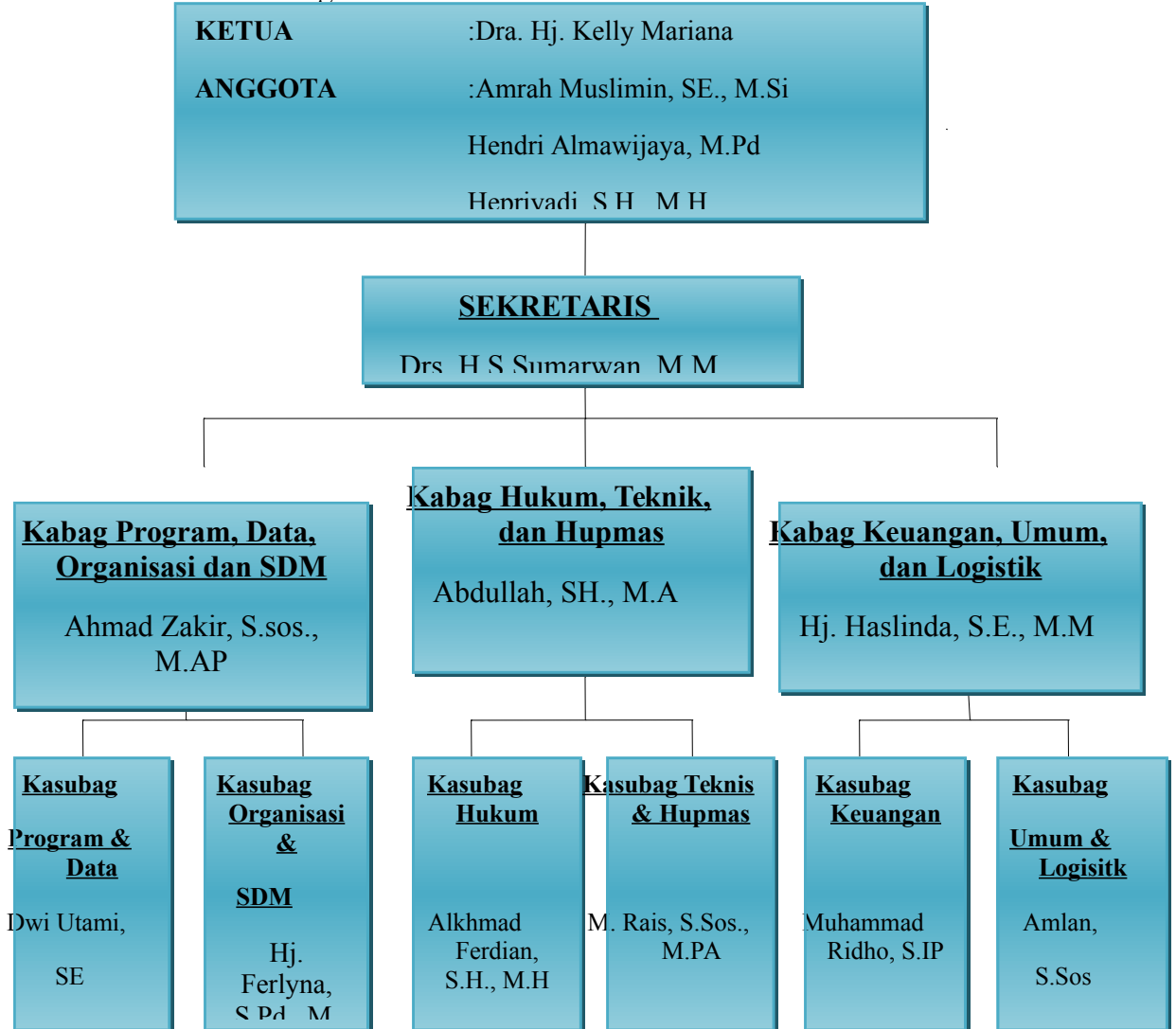
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan cepat.
2. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
6. Memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu.

F. Struktur Organisasi

Struktur adalah struktur Organisasi komisi pemilihan umum provinsi Sumatera Selatan.

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan



Sumber: KPU Provinsi Sumatera Selatan

G. Maksud dan Tujuan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Adapun maksud dari Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah²³ :

23 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

1. Sebagai wadah edukasi bagi masyarakat Sumatera Selatan agar mengetahui dan memahami proses pemilihan serta menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat yang nantinya akan bermuara pada meningkatnya kepedulian dan partisipasi dalam Pemilu.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawab kinerja pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih Tahun 2018.

Tujuan dari Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah :

1. Peningkatan Partisipasi
Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode di luar pemilihan. Peningkatan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu;
2. Peningkatan literasi politik
Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan dalam literasi pemilih meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan literasi politik dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode pemilihan dan di luar periode pemilihan. Literasi politik yang baik menjadikan

pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi dalam sebuah proses politik.

3. Peningkatan Kerelawanan (*Voluntaritas*)

Kerelawanan adalah partisipasi pemilih dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealisme tertentu dengan tanpa pamrih. Ide pokoknya adalah pada kehendak individu sebagai hasil kesadaran untuk berpartisipasi. Lawan dari kerelawanan adalah pragmatisme pemilih. Pragmatisme merujuk pada perilaku untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses politik karena adanya insentif material. Pada sikap pragmatis, pemilih melakukan komodifikasi atas partisipasi mereka dalam proses politik. Pemilih memperdagangkan posisi mereka untuk ditukar atau diperjual-belikan dengan sesuatu yang bersifat material. Situasi ini menjadi persoalan serius yang menggerogoti fundamental demokrasi. Sebab, demokrasi akan menjadi mahal, hubungan pemilih dengan pejabat publik akan terputus seketika transaksi sudah berlangsung, dan korupsi akan berkembang biak.

4. Mendukung masyarakat akan pentingnya Pemilu dan demokrasi dengan :

- a. Memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi (pra pemilih).
- b. Meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen).
- c. Menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen).
- d. Menjadi wadah silahturami komunitas peduli pemilu dan demokrasi (pegiat pemilu).

H. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembag Negara Republik Indonesia Nomro 5246);
3. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008 dan peraturan KPU nomor 37 tahun 2008;
4. Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KP Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008;
5. Perautran KPU nomor 04 tahun 2010 Tentng Uraian Tugas Staf Pelaksanaan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
6. Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU.
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Sebagaimana diadakannya pemilihan umum antara lain adalah guna memperoleh legitimasi rakyat bagi pemimpin atau anggota legislatif. Untuk melahirkan kepemimpinan politik yang berkualitas dan memiliki akutabilitas tinggi, karena itulah untuk memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal maupun daerah, pemilu merupakan instrumen terbaik dalam menentukan pemimpin yang legitimasi. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu legitimasi yang kuat atau rendah.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

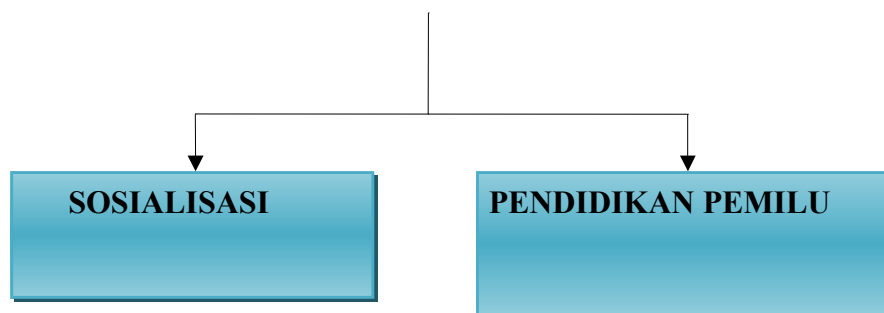
Pada bagian ini peneliti akan menggambarkan tentang upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, upaya apa saja yang yang di lakukan KPU dan tanggapan masyarakat terhadap upaya yang di lakukan KPU terhadap partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU membangun visi untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis. Untuk menjalankan visi tersebut, KPU membentuk misi “meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan”. Misi dikonkritkan dengan 350 kegiatan pendidikan pemilih sampai dengan Pemilu 2019. Masing-masing kegiatan dilaksanakan 9 kali pada 2016, 91 kali pada 2017, 100 kali pada 2018, dan 150 kali pada 2019.²⁴ Secara umum dapat di gambarkan sebagai berikut:

Bagan 3. 1

Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan





Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dan Pemilu serentak tahun 2019, salah satunya sosialisasi. Kegiatan sosialisasi tatap muka atau dengan simulasi di selenggarakan untuk memberikan pemahaman, penjelasan dan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat, program dan jadwal waktu pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dan pemilu 2019. Dengan metode ini narasumber berdialog dengan peserta sehingga segala sesuatu yang masih belum dipahami oleh peserta dapat dijawab secara langsung oleh narasumber. Secara rinci dapat peneliti tampilkan tabel berikut ini :

Tabel 3. 1
Upaya Sosialisasi yang dilakukan KPU
Provinsi Sumatera Selatan

N	Jenis Sosialisasi	Lokasi	Waktu
---	-------------------	--------	-------

0			
1	Debat Publik	KPU Provinsi Sumatera Selatan	8 maret 2018
2	Go To School	<ul style="list-style-type: none"> - SMK N 7 Palembang - SMA N 17 Palembang - SMA N 1 Palembang - SMA YKPP Pendopo Talang Ubi - SMA Muhammadiyah 1 Palembang - SMA N 11 Palembang - SMA N 4 Palembang - SMA N 10 Palembang 	<ul style="list-style-type: none"> 12 April 2018 13 April 2018 16 April 2018 27 April 2018 29 Januari 2019 11 Februari 2019 22 Februari 2019 14 Maret 2019
3	Go To Campus	<ul style="list-style-type: none"> - Universitas IGM Palembang - STISIPOL Chandradimuka Palembang - Universitas Taman Siswa Palembang - UIN Raden Fatah Palembang - Universitas Sriwijaya Indralaya - Universitas Bina Darma Palembang - Universitas Sriwijaya Palembang - Universitas Muhammadiyah Palembang - Poltek Negeri Sriwijaya Palembang 	<ul style="list-style-type: none"> 17 April 2018 11 Mei 2018 18 Februari 2019 14 Mei 2018 20 Februari 2019 27 Februari 2019 05 Maret 2019 11 Maret 2019 13 Maret 2019 20 Maret 2019
4	Goes To Mall	<ul style="list-style-type: none"> - Palembang Squire - OPI Mall - Palembang Trade Centre - Palembang Indah Mall 	<ul style="list-style-type: none"> 7 April 2018 14 April 2018 21 April 2018 28 April 2018
5	Goes To Public Place	<ul style="list-style-type: none"> - Jakabaring Sport City - Kambang Iwak - Benteng Kuto Besak 	<ul style="list-style-type: none"> 1 April 2018 15 April 2018 29 April 2018 8 April 2018 22 April 2018 6 mei 2018 20 Mei 2018 13 Mei 2018

		- Pendestrian Sudirman	27 Mei 2018 30 November 2018 01 Desember 2018 07 November 2018 08 Desember 2018 15 Desember 2018
6	Melalui Pendekatan Budaya	- Aula RRI Palembang - Cafe Tiger Bina Darma Palembang	5 Mei 2018 21 April 2019
7	Pendekatan Terhadap masyarakat	- Palembang - Pagar Alam - Lubuk Linggau - Ogan Komering Ulu - Parkir Rumah Dinas Wali Kota Palembang	07 April 2019
8	Pemilih Marginal	- TPA Sukawinatan	25 mei 2018
9	Penyandang Disabilitas	- Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa	28 mei 2018
10	Komunitas Nelayan	- Sungsang	12 Mei 2018
11	<i>Ngeradak</i> Kampung	- Jl. Pangerang Sidang Ing Lautan Lr. Kedukan Bukit II Rt. 11 35 Ilir Palembang - Halaman Gedung Serbaguna Palmeran Jl. Tehal Binangun Kel. Plaju darat Kec. Plau Palembang - Komplek Remco Rt. 20 Orag baru Kertapatih - Komplek Griya Handayani kec. Sukajadi Kab. Banyuasin - Halaman Kantor kelurahan Patih Galuh Prabumulih Barat Kota Prabumulih - Kecamatan Sirah Pulau Padang	01 Mei 2018 04 mei 2018 08 Mei 2018 10 mei 2018 12 mei 2018 14 mei 2018

		Kabupaten Ogan Komering Ilir	
12	Kaum Lanjut Usia	- Kampung Kapitan	
13	Media Massa	- Facebook - Twiter - Instagram - Line	
14	Media Elektronik	- TVRI Palembang - Pal TV - Sriwijaya TV	
15	Media Cetak	- Jln. KH. Azhari Kertapatih Palembang - Jln. Lintas Palembang – Lampung Ogan Komering Ilir - Jln. Lintas Palembang Jambi Simpang Pasar Sungai Lilin Muba - Tanjung Siapi-api Simpang Bandara - Simpang Talang Keramat Banyuasin - Jln. Lintas Sumatera Dekat Pasar Indralaya - Simpang Talang Pangerang Kabupaten Ogan Komering Ilir - Jln. Simpang Guru-guru / Simpang Masjid Agung Palembang	
16	Pindah Memilih	- Pal TV - TVRI Sumatera Selatan	1 sampai 17 Maret 2019

Tabel 3. 2
Upaya Pendidikan Pemilu yang dilakukan KPU
Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Pendidikan Pemilu	Lokasi
----	-------------------------	--------

1	Pemilihan Duta KPU	Mall Palembang Icon
2	Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya	KPU Provinsi Sumatera Selatan
3	Relawan Demokrasi	Kabupaten/kota

Dari seluruh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilu dapat peneliti uraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018

Pada bulan Februari tahun 2018 KPU Provinsis Sumatera Selatan melakukan kegiatan sebagai berikut :

Rapat Pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 13 Februari 2018 di tempat Ballroom hotel Novotel. Rapat Pleno terbuka tersebut menghasilkan keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4/PL.03.3-kpt/16/Prov/II/208 tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2018, yaitu :

Tabel 3.3
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung dan Jumlah Kursi
H. Herman Deru, SH, MM dan Ir. H. Mawardi Yahya	1	1. PAN 6 (enam) kursi 2. Nasdem 5 (lima) kursi 3. Hanura 5 (lima) kursi Jumlah 16 (enam belas)
H. Saifudin Aswari Riva'i SE dan H. M. Irwansyah S.Sos, M.Si	2	1. Gerindra 10 (sepuluh) kursi 2. PKS 5 (lima) kursi

		Jumlah 15 (lima belas kursi)
Ir. H. Ishak Mekki, MM dan Yhuda Pratomo, M.Sc. Ph. D	3	1. Demokrat 11 (sebelas) kursi 2. PBB 2 (dua) kursi 3. PPP 2 (dua) kursi Jumlah 15 (lima belas) kursi
H. Dodi Reza Alex Noerdin.Lic, Econ. MBA dan M. Giri Ramanda N. Kiemas	4	1. PDI-P 13 (tiga belas) kursi 2. Golkar 10 (sepuluh) kursi 3. PKB 6 (enam) kursi Jumlah 29 (dua puluh sembilan) kursi

Pada bulan maret KPU provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Debat Publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 dengan pasangan calon/tim kampanye. Pada hari kamis tanggal 8 Maret 2018 bertempat KPU Provinsi Sumatera Selatan Jl. Pangeran ratu jakabaring Palembang. Dalam rangka pelaksanaa tahapan, program dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2018, KPU provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Debat Publik yang diikuti (empat) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 dilaksanakan pada rabu tanggal 14 maret 2018 pukul 19.00 WIB sampai 21.00 WIB di hotel Novotel Jl. R. Sukamto Palembang.

Empat pasangan calon gubernur Sumatera Selatan adu visi misi dalam debat kandidat yang di gelar KPU Provinsi Sumatera Selatan. Para calon pemimpin Sumatera

Selatan dalam mengkonsepkan pemecahan persoalan yang terjadi., terkait reformasi birokrasi dan persoalan ekonomi hukum politik dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

2. Sosialisasi *Goes to School* (Pemilih Pemula NO GOLPUT)

Sosialisasi di lakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan di sekolah karena menjadi salah satu target yakni pemilih pemula yang rata-rata kelas 12 yang sudah berusia 17 tahun. KPU Provinsi Sumatera Selatan berharap mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Alasan KPU melakukan sosialisasi dengan kaum pemilih pemula karena pemilih pemula merupakan generasi muda atau millennial yang jumlahnya cukup banyak, untuk menentukan suksesnya pemilu KPU melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sosialisasi yang telah dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan, sebagai berikut:

a. Pilkada Serentak 2018

Kegiatan ini dilaksanakan di SMK N 7 Palembang pada tanggal 12 April 2018. Peserta yang hadir terdiri dari siswa siswi SMK 3 dan SMK N 7 Palembang, kegiatan ini bekerja sama dengan Zetizen Sumatera Ekspres hadir dalam kegiatan tersebut komisioner divisi Parmas dan SDM Ahmad Naafi, SH, MKn, sekretaris KPU provinsi Sumatera Selatan H.M Sumarwan dan staf sekretaris KPU provinsi Sumatera Selatan. Selain di SMK 7 Palembang KPU juga melaksanakan kegiatan sosialisasi di sekolah lain.

Kegiatan di SMA N 17 Palembang pada tanggal 13 April 2018. Peserta yang hadir terdiri dari siswa siswi SMA N 17, SMA Xaverius 2 dan SMK 6 Palembang,

kegiatan ini bekerjasama dengan Zetizen Sumatera Selatan Ekspres hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner Divisi Parmas dan SDM Ahmad Naafi, SH, MKn, dan Staf Sekretaria KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya kegiatan ini juga dilaksanakan di SMA Negeri 1 Palembang pada tanggal 16 April 2018. Peserta yang hadir terdiri dari siswa siswi SMA Negeri 10 Palembang, SMA Negeri 2 Palembang dan SMA Srijaya Negeri Palembang, kegiatan ini bekerjasama dengan Zetizen Sumatera Ekspres hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner Divisi Umum, Keuangan dan Logistik H. Aspahani, SE, AK, MM, CA, dan staf sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Terakhir kegiatan sosialisasi sekolah ini dilaksanakan di SMA YKPP Pendopo Talang Ubi pada tanggal 27 April 2018. Peserta yang hadir terdiri dari siswa siswi SMA N 2 Unggulan, SMAN 1, SMA YKPP, SMA TPLP PGRI, SMK Kesehatan Talang Ubi Pali, kegiatan ini bekerjasama dengan Zetizen Sumatera Ekspres hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner Divisi Parmas dan SDM Ahmad Naafi, SH, MKn, dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 3.1 Sosialisasi di SMK 5 Palembang

Guna meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Provinsi Sumatera Selatan ikut melibatkan kalangan pelajar untuk mensosialisasikan pentingnya menyalurkan hak pilih pada pemilihan gubernur Sumatera Selatan 27 Juni 2018 mendatang. Komisioner KPU Sumatera Selatan Divisi SDM dan partisipasi masyarakat Ahmad Naafi mengatakan, Program KPU Sumatera Selatan *Goes To School* ini tidak sekedar mengajak para pelajar untuk menyalurkan hak pilihnya, tapi juga melibatkan mereka menjadi duta pemilu. *“Kami sengaja jemput bola ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman ada para pelajar tentang tahapan pemilu. Sekaligus melibatkan mereka ikut mensosialisasikan pada masyarakat untuk memerangi Golput”*²⁵

25 Wawancara Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, pada 19 Mei 2019

Katanya saat sosialisasi dengan pelajar SMAN 6 Palembang, SMA Xaverius 3 Palembang, SMA 17 Palembang yang di pusatkan di aula SMA 17 Palembang.

Tanggapan ibu Ria Wilastri Wakil Humas SMA 17 Palembang terhadap upaya KPU yang telah di laksanakan di SMA 17 Palembang,

Kegiatan tersebut sangat baik untuk anak-anak, disana mereka di ajarkan mekanisme cara pencoblosan, dari awal masuk TPS sampai keluar TPS mereka di jelaskan secara keseluruhan. Tetapi untuk siswa yang sudah berumur 17 tahun sudah banyak lulus, jadi yang ikut sosialisasi itu kebanyakan anak-anak yang belum bisa mencoblos atau di bawah 17 tahun. Dan permasalahan lainnya anak-anak yang sudah 17 tahun banyak belum punya KTP, itu menghambat anak-anak untuk mencoblos.²⁶

Pada kesempatan itu, KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan pemahaman pada para pelajar tentang tahapan pemilu, mekanisme pencoblosan hingga pengenalkan 4 pasangan calon dengan membuka contoh surat suara.

b. Pemilu Serentak 2019

- Selasa 29 Januari 2019, SMA Muhammadiyah 1 Palembang “KPU Goes To School” SMA Muhammadiyah 1 Palembang bersama RRI PRO 2
- Kamis 11 Februari 2019, SMA Negeri 11 Palembang dengan tema “Pemilih Pemula Sukseskan Pemilu 2019, memilih itu juara”
- Jumat 22 Februari 2019, SMA Negeri 4 Palembang dengan tema “KPU Goes To School, membangun kesadaran generasi Milenial dalam mensukseskan Pemilu 2019”
- Kamis 14 Maret 2019, SMA 10 Palembang dengan tema “Pesta Demokrasi di Hati Milenial Pada Pemilu 2019”

26 Ria Wilastri, Wakil Humas SMA 17 Palembang, Wawancara tanggal 22 Mei 2019

Dalam sosialisasi kaum pemula di sekolah peneliti tidak mengamati secara langsung dalam kegiatan tersebut, tetapi setelah kegiatan peneliti datang ke salah satu sekolah yang didatangi KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk wawancara. Peneliti mewawancarai salah satu guru dan siswa guna mempertanyakan tanggapan mereka tentang upaya yang telah dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dari hasil wawancara yang didapat peneliti, dimana salah satu seorang guru mengungkapkan bahwasanya banyak siswa yang sudah 17 tahun belum mendapatkan KTP, dimana kalau siswa belum mendapat KTP itu bisa menghambat mereka untuk mencoblos. Peneliti berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan bisa membuat kebijakan atau solusi terhadap siswa yang 17 tahun yang belum mempunyai KTP tetapi masih bisa memilih. Karena suara mereka sangat berharga dimana kita tahu bahwa pemilih pemula di Indonesia terutama di Sumatera Selatan cukup besar.

3. Sosialisasi *Goes to Campus*

Sosialisasi *Go To Campus* sangatlah penting karena mereka semua adalah generasi milenial yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam membangun masa depan bangsa. Indonesia adalah negara demokrasi, partisipasi penuh generasi milenial dalam pemilu menjadi kontribusi yang amat besar bagi negara. Karena itu, pada waktu pemilu yang melibatkan generasi milenial di dalamnya.

Pentingnya partisipasi generasi milenial dalam pemilu menimbulkan berbagai strategi dan upaya persuasi mengenai hal itu. Salah satu upaya yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan partisipasi yaitu dengan sosialisasi ke

kampus-kampus yang ada di Sumatera Selatan. KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi di kaum milenial karena banyaknya hoaks yang beredar dengan literasi politik bagi kaum milenial, karena itu penting untuk melakukan sosialisasi dengan kaum milenial supaya bisa menjelaskan bahayanya hoaks dan pentingnya menggunakan hak pilihnya. Berikut di bawah ini sosialisasi yang telah dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan di berbagai kampus yang ada di Sumatera Selatan, sebagai berikut:

a. Pilkada Serentak 2018

1) Universitas IGM Palembang

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018, dengan tema “Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2018 di Sumatera Selatan”. Hadir kegiatan tersebut Bapak DR, Ferry Kurnia Rizkyansyah (Komisioner KPU tahun 2017), Bapak Marzuki Alie, SE, MM, Ph.D (Rektor UIGM), Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Divisi SDM dan Parmas Ahmad Naafi, SH, MKn, kalangan mahasiswa-mahasisiwi UIGM Palembang dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bekerjasama dengan Radio RRI Palembang.

Pada acara *goes to campus* yang digelar di kampus Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), selain diberi pencerahan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, para pemilih pemula ini juga di bekali ilmu terkait pemilu oleh pakar politik Fery Kurnia Rizky Yansyah dan politisi nasional Marzuki Alie (mantan ketua DPR RI) yang ikut menjadi narasumber pada acara tersebut.

Juga hadir dalam kegiatan itu, Ketua KPU Sumatera Selatan Aspahani, komisioner divisi SDM dan partisipasi masyarakat Ahmad Naafi, komisioner divisi hukum Alaxander Abdullh, komisioner divisi teknik Liza Lizuarni, komisioner divisi perencanaan dan Heny Susantih, para akademisi dan kalangan mahasiswa pemula.

Pada kesempatan itu komisioner divisi SDM dan Partisipasi masyarakat Ahamd Naafi mengatakan, kegiatan *goes to campus* ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan KPU Sumatera Selatan untuk menjaring pemilih pemula.

“Harapannya, agar para mahasiswa dan semua peserta yang hadir agar dapat lebih aktif berpartisipasi pada setiap tahapan pemilu. Sehingga pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, kita semua hadir di TPS dan menjadi pemilih yang cerdas, karena pemilih yang cerdas selalu memilih berdasarkan kualitas”.²⁷

KPU Provinsi Sumatera Selatan makin semangat sosialisasi, khususnya pada pemilih pemula. Meningkatkan kepedulian mereka terhadap Pemilu dan membekali dengan pendidikan pemilih. “*Tanpa Pendidikan Pemilih, pemilu tidak akan ada nilai lebih. Melalui pemilih pemula ini, kami ingin berinvestasikan untuk menciptakan pemilih-pemilih cerdas, khususnya pada Pilkada Serantkj 2018 dan Pemilu 2019*”.²⁸

Seminar KPU Sumatera Selatan *goes to campus* yang disiarkan live di RRI Pro 2 Palembang tersebut, juga melakukan dialog interatif seputar pemilu. Penampilan teater dan music akustik dan mahasiswa semakin menambah kemeriahan acara.

27 Ahmad Naafi, Komisioner KPU Sumsel divisi SDM dan Partisipasi masyarakat, wawancara tanggal 23 Mei 2019

28 Abdullah, Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara tanggal 26 Mei 2019

2) STISIPOL Chandradimuka Palembang

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2018, dengan tema “Pemilih berdaulat, melawan Hoax dan Politik Uang”. Hadir kegiatan tersebut Bapak Febriansyah (Mewakili STISIPOL Chandradimuka), Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Divisi SDM dan Parmas Naafi, SH, MKn, kalagan mahasiswa-mahasisiwi STISIPOL Chandradimuka Palembang dan staf sekretariat KPU provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bekerjasama dengan Radio RRI Palembang. Tanggapan dari Febriansyah selaku Wakil Dekan III STISIPOL Chandradimuka,

Dalam kegiatan tersebut mahasiswa sangat berantusias, dalam kegiatan tersebut KPU mengajak mahasiswa supaya merangkul keluarga, teman, atau orang terdekat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu. Mahasiswa Stisipol selalu di arahkan dalam kegiatan yang bersangkutan dengan Pemilu baik di dalam kampus ataupun di luar.²⁹

Tidak ingin proses pemilihan kepala daerah serentak di Sumatera Selatan dicerai oleh kabar *hoax*, KPU Sumatera Selatan merangkul kalangan mahasiswa memerangi *hoax* pada acara KPU Sumatera Selatan *goes to campus* di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik, Palembang.

Dalam kesempatan itu, komisioner KPU Sumatera Selatan divisi SDM dan partisipasi masyarakat Ahmad Naafi, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilu 2019, kerap kali terjadi kampanye hitam dan berita hoax yang disebarkan oleh yang tida bertanggung jawab.

Beredarnya berita hoax akan merusak kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan, merusak rasionalitas pemilih dan menimbulkan konflik

29 Febriansyah, Wakil Dekan III STISIPOL Chandradimuka, Wawancara tanggal 25 Mei 2019

sosial. “*Jangan gampang terprovokasi dengan berita yang tidak jelas sumbernya, apalagi yang menyudutkan seseorang atau golongan,*”³⁰

Peran mahasiswa sebagai pemilih muda sangat diharapkan memerangi hoax dan ikut mengingatkan masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Dia juga mengingatkan kepada peserta sosialisasi agar cerdas dalam memilih pemimpin. Nilailah programnya dan kredibilitas paslon yang paling merakyat memimpin Sumatera Selatan.

“Hati-hati dengan politik uang, jangan gadaikan hak pilih karena hanya iming-iming materi dan mengajak jangan lupa datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih, beberapa menit di TPS menentukan arah kepemimpinan Sumatera Selatan ke depan, mari berperan untuk Sumatera Selatan lebih baik, dengan menyalurkan hak pilih sesuai hati nurani”³¹.

Tanggapan Marina Syafitri mahasiswa stisipol prodi ilmu administrasi negara semester enam (VI)

saya sangat merespon dengan positif perihal sosialisasi KPU Provisi Sumatera Selata untuk pilkada serentak 2018. Karena disaat itu yang bisa saya simpulkan KPU menghimbau kepada seluruh mahasiswa/i stisipol untuk membantu kinerja ataupun pergerakan dari KPU sendiri. Mahasiswa itu *agent of change* yang harus berfungsi layaknya pertumbuhan anak-anak baru yang bisa bersikap cerdas baik dalam berbicara, bertindak hingga memilih. Apalagi memilih calon pemimpin untuk provinsi ataupun negara. Apa yang disampaikan oleh KPU saat itu sudah cukup memotivasi saya sebagai seorang mahasiswa.

3) Universitas Taman Siswa Palembang

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2018, dengan tema “Pemilih Cerdas Memilih Pemimpin Berkualitas”. Hadir kegiatan tersebut bapak M.Tohir, SH,

30 Abdullah, Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara tanggal 26 Mei 2019

31 Herlis Miyannah, Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, wawancara tanggal 23 Mei 2019

MH (dosen taman siswa), komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan divisi SDM dan Parmas Ahmad Naafi, SH, Mkn, kalangan mahasiswa-mahasiswi Universitas Taman Siswa Palembang dan staf sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro2 FM Palembang.

b. Pemilu Serentak 2019

- “Talkshow bersama Generasi Milenial, katakan tidak pada Golput”
- Senin, 18 Februari 2019, Stisipol Chandradimuka Palembang dengan tema “Suara Milenial Menentukan Masa depan di Indonesia Lima Tahun Kedepan”
- Rabu, 20 Februari 2019, UIN Raden Fatah Palembang dengan tema “Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Himbau Pemilih Milenial untuk memilih dengan rasional dengan menggunakan hati nurani”
- Rabu, 27 Februari 2019, Universitas Sriwijaya Indralaya Palembang dengan tema “KPU harapkan Kaum Milenial Kawal Pemilu 2019”
- Selasa, 05 Maret, Universitas Bina Darma Palembang dengan tema “Gerakkan Cerdas Memilih, suara anda menentukan masa depan bangsa”
- Senin, 11 Maret 2019, Universitas Sriwijaya Palembang dengan tema “Rakyat Mencari pemimpin”
- Selasa, 13 Maret 2019, Universitas Muhammadiyah Palembang dengan tema “Peran Civitas pada suksesnya Pemilu 2019”

- Rabu, 20 Maret 2019, Poltek Negeri Sriwijaya Palembang dengan tema “Meningkatkan kesiapan milenial menghadapi pemilu yang berkualitas dan berintegritas”



Gambar 3. 2 Sosialisasi di UIN Raden Fatah Palembang

Dalam Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan di UIN Raden Fatah Peneliti mengamati langsung kegiatan. Kegiatan tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya memilih, menghimbau mahasiswa supaya memilih dengan hati nurani tanpa ada ajakan dari luar, dan juga dalam kegiatan tersebut ada juga pendidikan pemilu mahasiswa di kenalkan dengan kelima kerta suara, sistemmatika pencoblosan. Dari kegiatan tersebut dapat di lihat mahasiswa sangat bersemangat dimana banyak mahasiswa bertanya langsung kepada narasumber.

Dari pengamatan secara langsung peneliti berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan di lapangan UIN Raden Fatah Palembang yang langsung bisa di lihat mahasiswa tidak dibatasi peserta terutama mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, karena waktu kegiatan KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan di dalam ruangan sehingga banyak mahasiswa tidak mengetahui bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan sedang melakukan kegiatan sosialisasi di UIN Raden Fatah Palembang. Selain di UIN Raden Fatah Palembang peneliti juga berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan sosialisasi di halaman kampus lainya yang menjadi sasaran KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Sosialisasi supaya mudah di lihat mahasiswa dan tanpa di batasi jumlah peserta.

4. Sosialisasi *Goes to Mall*

Sosialisasi selanjutnya dilakukan di mall-mall yang ada dikota Palembang, dimana sosialisasi ini bertujuan supaya masyarakat secara tidak langsung bisa ikut kegiatan tersebut. Dimana masyarakat yang bisa melihat langsung acara tersebut apalagi acara di lakukan di dalam mall yang selalu di lewati masyarakat ketika mereka berbelanja di mall. Alasan KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi di mall-mall yang ada di Palembang, dimana banyak masyarakat yang malas menghadiri acara sosialisasi pemilu, jadi disini KPU Provinsi Sumatera Selatan yang mendatangi masyarakat. Beberapa mall yang di telah didatangi KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan sosialisasi, sebagai berikut:

- a. Kegiatan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 7 April 2018 di Palembang Square
- b. Kegiatan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 14 April 2018 di OPI Mall
- c. Kegiatan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 di Palembang Trade Centre
- d. Kegiatan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 di Palembang Indah Mall

Dari hasil data yang peneliti dapat, peneliti berharap di tengah-tengah kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan di tampilkan beberapa musik supaya bisa menarik perhatian masyarakat yang ada di mall tempat sosialisasi.

5. Sosialisasi *Goes to Public Place*

Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi di beberapa tempat umum yang biasa tempat masyarakat berkumpul. Alasan KPU Provinsi Sumatera Selatan mendatangi tempat-tempat umum, dimana tempat-tempat yang di datangi KPU Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat-tempat masyarakat Palembang berkumpulnya untuk olahraga, makan-makan, dan tempat dimana paling kondusif untuk masyarakat berkumpul. Sosialisasi tersebut bertujuan supaya masyarakat bisa melihat secara langsung kegiatan tersebut, tempat-tempat umum yang telah didatangi KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a. Pilkada Serentak 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan menggelar sosialisasi diarena Car Free Day Kambang Iwak, guna menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilihan gubernur Sumatera Selatan 2018. Areal keramaian seperti kawasan car free day kambang Iwak ini sangat efektif dimanfaatkan sebagai ajang partisipasi pada pencoblosan Pilkada 2018. Selain menyampaikan tahapan pemilu tim KPU Provinsi Sumatera Selatan juga membuka layanan pengecekan daftar pemilih, melalui aplikasi. Cukup dengan nomor KTP, dapat mengecek apakah nama tersebut sudah masuk dalam daftar atau belum. KPU Provinsi Sumatera Selatan sudah menggelar sosialisasi serupa di kawasan :

- Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 1 April 2018 di Jakabaring Sport City
- Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 8 April 2018 di Kambang Iwak
- Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 15 April 2018 di Jakabaring Sport City
- Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 22 April 2018 di Kambang Iwak
- Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 29 April 2018 di Jakabaring Sport City
- Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 di Kambang Iwak

- Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 di Benteng Kuto Besak
- Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 di Kambang Iwak
- Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 di Benteng Kuto besak



Gambar 3.3 Sosialisasi di Kambang Iwak

b. Pemilu Serentak 2019

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendestrian Sudirman pada Pukul 19.30 WIB s.d Selesai, Adapun kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal:

- Jumat, 30 November 2018 dengan tema “Anak Muda Melek Pemilu”
- Sabtu, 01 Desember 2018 dengan tema “Pemilu Asyik”
- Jum’at, 07 November 2018 dengan tema “Kenali Jenis Surat Suara”
- Sabtu, 08 Desember 2018 dengan tema “Kampanye *No Money Politic No Hoax*”
- Sabtu, 15 Desember 2018 dengan tema “Jadilah Pemilih Cerdas, kenali calon yang di pilih”

Dalam kegiatan sosialisasi KPU Provinsi Sumatera Selatan di Kambang Iwak peneliti ikut langsung dan mengamati proses kegiatan, kegiatan tersebut di hiburan langsung oleh band lokal Palembang. Saat berlangsungnya acara kegiatan tersebut diguyur hujan sehingga masyarakat yang melihat langsung ke bawah tenda. Masyarakat masih bersemangat walaupun hujan lebat, disana rombongan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan menari jingle pemilu 2019 di tengah-tengah hujan mengajak masyarakat. Kegiatan masih berlangsung sampai hujan berhenti,

Pada kegiatan tersebut KPU Provinsi Sumatera Selatan mengenalkan kelima kertas suara, menjelaskan pindah memilih, dan menjelaskan kepada masyarakat menggunakan aplikasi yang bisa melihat apakah masyarakat terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah acara hampir selesai KPU Provinsi Sumatera Selatan memberi pertanyaan kepada masyarakat dan yang bisa menjawab akan di beri hadiah. Waktu tanya jawab peneliti menjawab pertanyaan yang disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan.

6. Sosialisasi Melalui Pendekatan Budaya

Sosialisasi selanjutnya dilakukan melalui pendekatan budaya, tujuan sosialisasi ini supaya bisa menarik perhatian rakyat bisa mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Apalagi di kaum milenial selain mensosialisasikan pemilu KPU Provinsi Sumatera Selatan juga bisa langsung memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia terutama budaya khas Sumatera Selatan. Alasan KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi melalui pendekatan budaya dimana masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan karena untuk sekarang budaya jarang di tampilkan langsung ke masyarakat, terutama masyarakat di Sumatera Selatan. Berikut sosialisasi melalui pendekatan budaya:

a. Pilkada Serentak 2018

Pementasan pagelaran wayang sebagai bentuk penyampaian sosialisasi melalui kebudayaan kepada masyarakat Sumatera Selatan. Pelaksanaan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018. Dihadiri oleh komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Naafi, pesan yang disampaikan adalah informasi terkait Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018. Adapun pelaksana pagelaran seni tersebut dilaksanakan oleh Paguyuban seni Anggon Laras Sumatera Selatan, bertempat di Aula RRI Palembang.

b. Pemilu Serentak 2019

Pementasan Pagelaran Dulmuluk Modern (Joni Wak Dolah Cs) dengan Tema “Membangun Pemili Berdaulat” guna menyukseskan Pemilu Serentak 2019 dan musik

Sailin dibuka langsung oleh ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan H. Asphani. Adapun pelaksanaan pangelaran seni dan budaya tersebut bekerjasama dengan Sumeks, bertempat di Cafe Tiger Bina Darma Palembang pada tanggal 21 April 2019.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dari KPU untuk mensosialisasikan Pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 kepada masyarakat dan generasi milenial. Dengan harapan agar bisa memenuhi target partisipasi pemilih nasional. Oleh karenanya, untuk menysasar pemilih milenial, KPU menyelenggarakan kegiatan pentas seni berupa Pementasan seni.

KPU harus selalu berupaya meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan beragam upaya sosialisasi. Denga tujuan mampu meningkatkan partisipasi pemilih. *“Tujuan utaa kegiatan ini bahwa 27 Juli kita berupaay untuk meningkatkan partisipasi, sesuai target nasional yakni 77,5%.”*³²



Gambar 3. 4 Dokumentasi Kegiatan Pergelelran Seni

32 Abdullah, Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara tanggal 26 Mei 2019

Dari data yang di dapat peneliti, peneliti berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan menjadikan sosialisasi pendekatan melalui budaya bisa dilakukan secara rutin sehingga sosialisasi itu bisa selalu di tunggu rakyat. Peneliti juga berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan juga bisa mengarahkan KPU kabupaten/kota untuk melakukan kegiatan serupa.

7. Sosialisasi Melalui Pendekatan Terhadap Masyarakat

Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi melalui pendekatan terhadap masyarakat dengan melakukan *Funbike* yang di adakan di beberapa daerah yang ada di Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan supaya bisa menarik masyarakat terutama di kaum milenial yang dimana bisa membuat mereka lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Alasan KPU melakukan kegiatan ini karena dari kaum muda maupun dewasa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, terutama kegiatan yang berhubungan dengan olahraga. Sosialisasi yang telah dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan melalui pendekatan terhadap masyarakat, sebagai berikut:

a. Pilkada Serentak 2018

Funbike “Sukseskan Pilkada Serentak 2018” serentak di 4 Kabupaten/Kota Palembang, Pagaram, Lubuk Linggau dan OKU. Pelaksanaan *funbike* di bekerjasama dengan Sumeks Kreatif Palembang.



Gambar 3. 5 *Funbike* KPU Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya KPU Sumatera Selatan menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Sumatera Selatan. Masyarakat mengikuti KPU Sumatera Selatan *Fun Bike* cukup tinggi, dilihat dari peserta yang mnegikuti sampai ribuan pesepeda. Komisioner KPU mengatakan bahwa hari 27 Juli 2018 adalah hari bersejarah untuk provinsi Sumatera Selatan. Di hari itu, setipa masyarakat Sumatera Selatan menjadi penentu, untuk menduduki siapa yang menjadi pemimpin provinsi ini ke depan.

Pada kesempatan itu, pantia Fun Bike di 4 kabupaten/koya dan KPU setempat memberikan pendidikan pemilu kepada para peserta *Fun Bike*. Menjelaskan tahapan-tahapan pemilu serta hak dan kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi pada pesta demokrasi. Tidak hanya itu, KPU Sumatera Selatan juga membagikan banyak *dor prize* bagi para peserta, mulai dari sepeda gunung, alat elektronik, alat rumah tangga, payunng jam dan hal lainnya yang bernuansa Pilkada Serentak.

b. Pemilu Serentak 2019

KPU Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan PT Sumeks Kreatif Palembang (*Event Organizer* harian pagi Sumatera Ekspres) menggelar Event Pemilu Run 2019 (Fun Run dan Senam Sehat) Tahun 2019 yang di gelar Minggu, 7 April di halaman parkir depan rumah dinas Wali Kota Palembang, komunitas senam jantung sehat Palembang dan masyarakat Umum.

Peserta terdiri dari unsur Muspida Sumatera Selatan, Muspika Palembang, Caleg DPRD Sumatera Selatan Kota Palembang, DPR RI, DPD, Partai Politik Pendukung, PKK dan PPS, pelajar SMA/SMK/MA/Pemilih Pemula di Palembang, Komunitas Senam Jantung sehat Palembang dan masyarakat umum.

Pada kegiatan tersebut peneliti langsung ikut kegiatan dan mengamati secara langsung bagaimana proses kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan tersebut jam 6 pagi sudah di mulai, antusias masyarakat sangat bagus karena bisa dilihat dari peserta yang ikut dalam kegiatan.

8. Sosialisasi ke Pemilih Marginal

Pemilihan Umum adalah hajatan demokrasi yang melibatkan warga negara wajib pilih. Dalam pemilu merupakan ajang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya kepada kontestan yang bertarung. Di dalamnya tentu masyarakat memiliki suatu harapan besar bagaimana melahirkan seorang pemimpin yang amanah, anti korupsi, berpihak pada kaum marginal, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan pelayanan publik

Sosialisasi ke Kaum Marginal sangat penting karena permasalahan sekarang dimana hilangnya kepercayaan masyarakat kepada para politisi/kandidat yang bertarung pada pemilihan umum. Masalah janji yang tidak ditepati, tersangkut persoalan korupsi, tidak serius memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya permasalahan itu membuat masyarakat apalagi Kaum Marginal kurang berpartisipasi karena mereka kecewa terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan juga membuat mereka mudah menerima uang untuk memilih salah satu kandidat. Contohnya, yaitu daerah saya sendiri banyak masyarakat menerima uang atau *money politic* karena mereka berpikir siapa pun pemimpinnya kehidupan mereka sama saja tidak ada perubahan.

Alasan KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi di kaum Marginal karena kaum marginal rawan terhadap *Money Politik* dan Golput sehingga sangat penting sosialisasi terhadap mereka. KPU Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan kepada kaum marginal bahwa pentingnya menggunakan suara karena suara menentukan pemimpin dimasa depan, berbahayanya *Money Politik* karena itu akar akan terjadinya korupsi, dan memperkenalkan calon kandidat yang akan mencalonkan diri.

Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 di TPA Sukawinatan di hadiri oleh komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Naafi dan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan sosialisasi ini bekerjasama dengan PT. Wahana Semesta Palembang Penerbit harian umum Palembang Pos. Agar masyarakat kota Palembang bisa mendapat HAK pilihnya, dan mendapatkan pemimpin sesuai harapan serta kinginannya.

Metode sosialisasi yang digunakan yaitu dengan tatap muka, presentasi dan dialog kepada para masyarakat marginal atau terpinggiran, peserta sosialisasi adalah mereka yang telah memiliki hak memilih. M. Kurniawan Rachmatullah salah satu perwakilan dari relawan Demokrasi mengatakan,

Sosialisasi ini sangat penting, untuk meningkatkan partisipasi warga dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, karena masyarakat marginal merupakan masyarakat yang rawan GOLPUT (Golongan Putih), bukan itu saja, mereka juga rawan terkena Politik Uang (Money Politic).³³

Sosialisasi ini juga mengenalkan kepada masyarakat marginal mengenai calon-calon yang berhak mereka coblos, dan juga mengingatkan kepada masyarakat agar melihat apakah namanya terdapat di DPT (Daftar Pemilih Tetap maka untuk segera mengurusnya. *“Warga yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada 2018 dan pemilu 2019 maka wajib baginya mencoblos pada Pilkada Juli mendatang, entah itu dari kalangan bawah, menengah dan atas.*

Dari hasil penelti dapat tentang sosialisasi Kaum Marginal peneliti berharap KPU lebih banyak melakukan sosialisasi bila perlu *door to door* ke kaum marginal, karena selain rawan GolPut kaum marginal juga sering terjadi politik uang, dimana kita tahu sendiri kaum marginal merupakan masyarakat pinggiran yang mempunyai biaya kehidupan pas-pasan yang membuat mereka tidak berpikir panjang lagi dalam menerima politik uang.

33 M. Kurniawan Rachmatullah, Relawan Demokrasi, Wawancara tanggal 26 Mei 2019

9. Sosialisasi ke Penyandang Disabilitas

Sosialisasi berikutnya dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan ke Penyandang Disabilitas, pentingnya sosialisasi di Penyandang disabilitas karena mereka merupakan warga negara yang berhak di perhatikan suaranya, karena pemilih penyandang disabilitas di Sumatera Selatan cukup banyak yang dapat di lihat tabel dibawah ini:

Tabel 3. 4
Pemilih Penyandang Disabilitas Di
Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Runggu/Wicara	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya
1	OKU	123	78	88	39	84
2	OKI	82	61	62	26	31
3	Muara Enim	286	176	211	148	106
4	Lahat	220	89	194	109	118
5	Musi Rawas	113	75	67	68	59
6	Musi Banyuasin	171	135	141	117	80
7	Banyuasin	145	86	116	46	117
8	OKU Timur	326	202	274	145	162
9	OKU Selatan	24	13	49	27	14
10	Ogan Ilir	217	123	178	104	104
11	Empat Lawang	12	14	7	8	9
12	PALI	50	44	59	17	17
13	Muratara	29	25	24	15	36
14	Palembang	132	233	92	99	157
15	Pagar Alam	24	14	11	26	13
16	Lubuk Linggau	49	39	21	22	34
17	Prabumulih	27	8	23	5	58
Total		2.030	1.415	1.617	1.021	1.199

Sumber: KPU Provinsi Sumatera Selatan

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa penyandang disabilitas di Sumatera Selatan cukup tinggi, dengan itu KPU Provinsi Sumatera Selatan juga harus memperhatikan

suara penyandang disabilitas. Keterbatas fisik mereka membuat tidak banyak dari mereka menggunakan suara mereka karena kurangnya fisik mereka. Alasan KPU melakukan sosialisasi ke penyandang disabilitas karena tidak semua penyandang disabilitas memahami soal pemilu, bahkan masih ada yang tidak mengerti sama sekali, dan juga mereka belum mengenal calon kandidat yang mencalonkan diri.

Sosialisasike Panti Sosiali Bina Daksa Budi Perkasa, sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018 di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa di hadiri oleh komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Aspahani, Liza Lizuarni dan sekretariat KPU provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan Sosialisasi ini bekerjasama dengan PT. Wahana semesta Palembang penerbut harian umum Palembang Pos.



Gambar 3. 6 Sosialisasi dengan Penyandang Disabilitas

Ratusan penyandang disabilitas mengikuti sosialisasi dan simulasi pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Meski dengan keterbatasan indra dan fisik tubuh, mereka sangat antusias mengikuti rangkaian sosialisasi pemilih yg

digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan dan Palembang pos. Kegiatan tersebut langsung dihadiri oleh ketua KPU Sumatera Selatan Asphani, yang menjadi pemateri dan pemandu jalannya simulasi.

Pada kesempatan itu, Aspahani menjelaskan tentang pentingnya menyalurkan hak pilih, dan juga mengenalkan 4 pasangan calon beserta program unggulannya pada peserta sosialisasi. *“Menyalurkan suara pada pilkada merupakan hak bagi setiap warga, negara mengatur itu dalam undang-undang.”*

Usai mendapatkan materi, para pemilih disabilitas langsung mengikuti simulasi pencoblosan. Suasana ruangan disulap menjadi tempat pemungutan suara, lengkap dengan bilik suara, kotak suara, surat suara khusus disabilitas dan perangkat pemilihan lainnya. Sementara itu Duta KPU menjadi panitia PPS.

Simulasi pencoblosan berjalan lancar, para peserta mengikuti prosesi pemilihan. Dengan membawa tongkat, kursi roda, dituntun bahkan ada yang harus merangkak. Kegiatan tersebut di mulai dengan dari mendaftarkan PPS, kemudian duduk di antrian, mengambil surat suara, mencoblos, memasukan surat suara dan menyelupkan kelingking ke tinta sebagai tanda mencoblos.

Nasrul (32), penyandang disabilitas yang tinggal di PSBD Budi Perkasa Palembang ini baru pertama kali absen dalam pencoblosan pilkada. Rasa sesal terasa karena tidak bisa menggunakan hak suaranya. Namun apa daya, jarak dari Palembang ke kampung halamannya Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan, membuat pria ini hanya pasrah.

Dari empat pasangan calon pilkada Sumatera Selatan, pria yang menggunakan kursi roda ini hanya mengetahui tiga orang paslon saja. *“Yang saya tahu itu ada anak Alex Noerdin (Gubernur Sumsel) Herman Deru dari Kabupaten OKU dan Ishak Mekki. Satu lagi tidak tahu siapa.”*³⁴ Meskipun fisiknya tidak sempurna, Nasrul yang pernah menjadi nelayan ini tetap semangat untuk mencoblos, walaupun harus merangkak menggunakan tangannya. *“Saya merangkak pakai tangan saat mau mencoblos, karena bilik TPS-nya tinggi, saya naik kekursi, tidak mau di bantu, karena saya tidak ingin di anggap cacat dan menyusahkan orang.”*³⁵

Keterbatasan fisik ternyata tidak membuat Nasrul dianggap sebelah mata oleh lingkungannya di Baturaja, Kabupaten OKU Sumatera Selatan.

*“Saya ingat waktu dulu, sekarang ada rasa sesal tidak bisa berpartisipasi. Tapi tidak mengapa yang penting nanti Gubernur Sumatera Selatan yang terpilih bisa melihat apa kebutuhan para disabilitas. Jangan hanya memprioritaskan orang normal saja.”*³⁶

Alfendi (17), binaan PDSB Bina Perkasa Palembang ini juga tidak menggunakan hak pilihnya saat pilkada Sumatera Selatan. Karena baru memasuki 17 Tahun dan belum mempunyai Electronic-kartu Tanda Pengenal (E-KTP), warga asal Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ini tidak bisa merasakan bagaimana suasana pencoblosan di TPS.

*“Ingin juga ikut mencoblos seperti yang lain, tapi belum ada E-KTP, agak susah juga mengurusnya, Cuma bingung juga kalau ikut mencoblosan, saya ada kenal satu orang pun calon gubernur Sumatera Selatan yang maju, takut nanti salah pilih pemimpin.”*³⁷

34 Nasrul, Penyandang Disabilitas, Wawancara tanggal 01 April 2019

35 Nasrul Penyandang Disabilitas, Wawancara tanggal 01 April 2019

36 Nasrul Penyandang Disabilitas, Wawancara tanggal 01 April 2019

37 Alfendi, siswa SMA Karya Ibu Palembang, Wawancara tanggal 01 April 2019

Siswa SMA karya ini ibu Palembang ini hanya mengharapkan adanya perhatian lebih dari pemerintah, terutama dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang akan mejabar lima tahun ke depan.

Tidak ada ketimpangan dalam penyediaan fasilitas umum menjadi impian remaja yang bercita-cita jadi atlit lari ini. Hal sederhana di ucapkan nya yaitu adanya transportasi khusus bagi penyandang disabilitas yang di sediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan.

“Kami tidak minta banyak, apa lagi untuk penyandang disabilitas, seperti teman saya yang pakai kursi roda, sulit untuk dia mau kemana-mana karena tidak ada transportasi yang memudahkannya, itu saja yan saya minta untuk pemimpin baru Sumatera Selatan.”³⁸

Tanggapan Pengurus penyandang disabilitas terhadap upaya yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama penyandang disabilitas dengan melakukan sosialisasi ke penyandang disabliltas sangat membantu, selain sosialisasi KPU juga melakukan pendidikan pemilih mengenalkan 4 pasangan calon dan menjelaskan simulasi pencoblosan kepada penyandnag disablilitas.

“Permasalahan dalam pencoblosan untuk penyandang disabilitas yaitu sarana-sarana KPU masih tidak akses untuk penyandang disabilitas, misalkan permasalahan TPS dimana penyandang disabilitas disiapkan TPS khusus sehingga tidak di gabungkan dengan TPS masyarakat, dimana jalan menuju TPS masyarakat kurang baik, banyak jalan menurun untuk penyandangg disabilitas.”³⁹

Pengurus penyandang disabilitas berharap panitia pilkada menyiapkan TPS khusus untuk penyandang disabilitas, karena kurang tepat kalau penyandang disabilitas TPS di gabung dengan masyarakat, dimana jalan menuju TPS tersebut lumayan susah karena jalannya tidak tepat untuk mereka yang fisiknya kurang. Di katakan kurang tepat

38 Muhammad Raizi, Kasubaag Teknik dan humas, Wawancara tanggal 01 April 2019

39 Samsul, pengurus penyandang disabilitas, wawancara tanggal 01 April 2019

karena jalan menurun sehingga membuat susah di jangkau oleh para penyandang disabilitas. *“Terus yang kedua disini di jalan aspal, terus kotak pilihannya di depan rumah orang diteras, terasnya agak tinggi, sedangkan mereka yang kursi roda kan susah , kalau bisanya aksesnya bagus misalnya di buat TPS khusus.”*⁴⁰

Selain permasalahan jalan, tempat pencoblosan pun kurang kondusif untuk penyandang disabilitas, dimana TPS masyarakat biasa di lakukan di halaman rumah masyarakat, kotak suara di tempatkan di atas meja yang membuat penyandang disabilitas susah melakukan pencoblosan terutama yang menggunakan kursi roda .

Dalam kegiatan Sosialisasi KPU Provinsi Sumatera Selatan peneliti tidak mengamati secara langsung, tetapi setelah acara peneliti mendatangi penyandang disabilitas untuk di wawancara. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan keinginan dari penyandang disabilitas dimana mereka membutuhkan TPS khusus karena keterbatasan fisik mereka membuat mereka susah datang ke TPS yang di gabungkan dengan masyarakat biasa. Peneliti berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan lebih memperhatikan pemilih penyandang disabilitas dan memberikan mereka TPS khusus karena suara mereka saat penting apalagi di Sumatera Selatan pemilih penyandang disabilitas di Sumatera Selatan cukup tinggi. Seperti yang dilakukan KPU Sumatera Utara yang menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilih penyandang Disabilitas.⁴¹

10. Sosialisasi Kepada Komunitas Nelayan

40 Muhammad Raiz, Kasubag Teknik dan humas, Wawancara tanggal 01 April 2019

41 <https://pemilu.kompas.com>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan sosialisasi demi mendorong tingkat partisipasi pemilih. Salah satunya seperti yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang menggelar sosialisasi di sebuah perkampungan nelayan di kecamatan Sungsang. Alasan KPU Provinsi Sumatera Selatan sosialisasi di Kampung nelayan karena profesi nelayan menjadi salah satu sasaran sosialisasi karena dianggap memiliki akses yang minim terhadap informasi mengenai pemilu.

Sosialisasi kepada komunitas nelayan di Sungsang. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2018 di hadir oleh komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Naafi, Liza Lizuarni, sekretariat KPU provinsi Sumatera Selatan Sumawan dan sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan, mengambil tempat didesa nelayan Sungsang Kabupaten Banyuasin. Pelaksanaan Sosialisasi ini bekerjasama dengan CV. Family Jaya Bersama.

Guna mengingatkan masyarakat pentingnya menyalurkan hak pilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan menggelar sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan di perkampungan nelayan Sungsang, kecamatan Banyuasin II. Ratusan warga nelayan Sungsang terlihat sangat antusias menyambut kedatangan tim sosialisasi dari KPU Sumatera Selatan. Mereka rela puasa meluat pada hari itu dan meninggalkan dagangan demi mendapatkan pendidikan pemilih dari KPU Sumatera Selatan.

“Sepanjang berdirinya kabupaten Banyuasin, ini adalah kali pertama daerah kami dikunjungi tim sosialisasi KPU. Ini merupakan surprise dan catatan sejarah buat kami warga perairan Sungsan, Dia juga berharap agar sosialisasi ini tidak

dilakukan sekali ini saja. Karena masih banyak warga butuh pemahaman pemilu, apalagi dijelaskan oleh ahlinya langsung”.⁴²

Dalam sosialisasi tersebut, Komisioner KPU Sumatera Selatan mengenalkan empat pasangan calon gubernur yang akan bertarung di pilkada Sumatera Selatan. Mereka juga menjelaskan tahapan-tahapan pemilu, syarat menjadi pemilih dan bagaimana bersikap cerdas dalam memilih pemimpin. Komisioner menjelaskan berpartisipasi pada pemilu sangatlah penting, karena 5 menit di TPS menentukan nasib daerah lima tahun ke depan, Pilkada ini penting karena menyangkut cita-cita semua untuk maju, masyarakat diberi kebebasan memilih pemimpin yang mempunyai visi dan misi sesuai keinginan masyarakat.

Ada beberapa hal yang mesti dilakukan dalam pemilu, pertama pasti sudah terdaftar sebagai pemilih tetap, kemudian kenali calon-calonnya. Selanjutnya, luangkan waktu datang TPS, pastikan nama sudah terdaftar, fahami syarat sah pencoblosan dan turut berpartisipasi aktif pasca pemilihan. Masyarakat juga diingatkan agar tidak terlibat dalam kecurangan pilkada, jangan coba-coba mencoblos dua kali di TPS yg sama atau TPS berbeda, jangan juga mengarahkan orang yang tidak memiliki hak pilih melakukan pencoblosan. Akibatnya fatal, bisa dikenakan kurungan penjara dan hukuman denda.

Peran warga sangat diharapkan dalam menciptakan pemilu yang aman dan berkualitas, hanya dalam pemilu suara masyarakat setara dengan suara bupati, gubernur bahkan presiden sekalipun. Semuanya memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan. Ini adalah kesempatan bagi semua warga dalam menentukan seperti apa pembangunan daerah kedepan. Untuk itu, masyarakat dituntut menjadi pemilih yang

42 KPU Provinsi Sumatera Selatan, 2018, *Jurnal Demokrasi Mengukir Sejarah Kepemimpinan Sumatera Selatan*, Palembang: KPU Provinsi Sumatera Selatan, hal. 17

cerdas agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Dengan sosialisasi ini diharapkan, partisipasi pemilih khususnya di wilayah perkampungan nelayan meningkat dari sebelumnya.

Dari data peneliti dapat, peneliti dapat melihat bahwa keinginan dari warga Sungsang yaitu KPU Provisi Sumatera Selatan dapat rutin melakukan kegiatan sosialisasi di Kampung nelayan. Peneliti berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan bisa melakukan kegiatan rutin sosialisasi di Kampung Nelayan selain kampung nelayan peneliti juga menginginkan KPU melakukan sosialisasi ke tempat-tempat yang minim informasi tentang pemilu.

11. *Ngeradak* Kampung

Sosialisasi selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan dengan mendatangi daerah-daerah tertentu untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang disebut *Ngeradak* Kampung, *Ngeradak* Kampung adalah mendatangi kampung rame-rame secara mendadak. *Ngeradak* kampung ini cukup penting karena daerah-daerah yang di kunjungi KPU Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang tingkat partisipasinya cukup rendah itulah alasan KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi dengan *Ngeradak* Kampung.

Ngeradak Kampung tanggal 1 Mei 2018 di Jl. Pangeran Sidong ing Lautan Lr.Kedukan Bukit II Rt. 11 35 Ilir Palembang, tanggal 4 Mei 2018 di halaman gedung serbaguna Palmerah Jl. Tegal Binangun Kel. Plaju darat kec. Plaju Palembang, tanggal 8 Mei 2018 di kompleks Remco Rt. 20 Orag Baru Kertapatih, tanggal 10 mei 2018

Komplek Griya Hndayani Kec. Sukajadi kabupaten Banyuasin, tanggal 12 Mei 2018 di halaman kantor kelurahan Patih Galuh Prabumulih Barat kota Prabumulih dan tanggal 14 mei 2018 di kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dari data yang di dapat peneliti bisa dilihat Cuma ada beberapa kampung yang didatangi, peneliti berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan bisa sosialisasi lebih banyak daerah lagi. Kalau memang tidak cukup waktu untuk mendatangi daerah-daerah yang lain, Peneliti berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan bisa mengarahkan KPU di berbagai Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan supaya bisa mendatangi atau mensosialisasikan ke daerah mereka masing-masing.

12. Sosialisasi Kaum Lanjut Usai di Kampung Kapitan

Sosialisasi selanjutnya yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan yaitu sosialisasi kaum lanjut usia di Kampung Kapitan. Alasan KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi di kaum lanjut usia karena pemilu merupakan hak setiap warga negara menggunakan suara mereka untuk menentukan pemimpin yang akan mereka pilih.

Biasanya, sosialisasi pemilih gencar menysasar pemilih pemula, namun berbeda yang dilakukan KPU Sumatera Selatan kali ini, mereka menyempatkan diri menyambangi kaum lanjut usia mensosialisasikan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018 di Kampung Kapitan.

Kedatangan Komisioner KPU Sumatera Selatan bersama tim sosialisasi pemilih disambut antusias oleh kalangan lanjut usia tersebut. Semangat mereka menyimak

sosialisasi dari KPU Sumatera Selatan menunjukkan kalau mereka ingin ambil bagian dalam menentukan arah kepemimpinan Sumatera Selatan kedepan .

Proses pemilihan umum bukanlah hal baru bagi mereka, namun di usia yang tidak mudah lagi. Tidak sedikit di antara lanjut usia yang harus bersusah payah untuk datang ke TPS. Pada prinsipnya para lansia sangat ini berpartisipasi pada pemilihan, mungkin ada yang sakit, susah berjalan, atau mata mulai rabun sehingga butuh bantuan datang ke TPS. Saya harap KPU Sumatera Selatan selaku penyelenggara dapat memberikan pertahatian khusus.

Kegiatan sosialisasi lansia ini bukan hanya mengajak mereka untuk memilih. Melainkan melibatkan para lansia ini menjadi perpanjangan tangap KPU untuk mensosialisasikan pentingnya hak pilih, pada semua masyarakat. Hak memilih diatur dalam undang-undang, siapapun itu dan bagaimanapun kondisinya, selagi masuk dalam daftar pemilih, KPU harus memfasilitasi hak mereka untuk meyalurkan pilihan. Pada tapan ini KPU juga menjelaskan tahapan pemilu dan mengenalkan psangan calon pilkada Sumatera Selatan pada peserta sosialisasi.

Dari hasil data yang di dapat peneliti ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi kaum lanjut usia. Fantor pertama adalah minumnya perhatian pemerintah dalam menguur daftar pemilih tetap (DPT), kedua kaum lanjut usia kurang fasilitas pendukung yang seharusnya disediakan pemerintahan untuk memudahkan disediakan pemerintahan untuk memudahkan mereka untuk memilih.

Peneliti berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan menyiapka fasilitas untuk kaum lanjut usia supaya bsa menggunakan suara mereka pada pemilu. Karena fisik Kaum

lanjut usia kebanyakan sudah melemah yang membuat mereka terhambat dalam menggunakan suara mereka pada pemili. Seperti yang di lakukan di daerah RW 03 Kelurahan Depok jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, jawa Barat yang memfasilitasi kaum lanjut usia dengan menjemput kaum lanjut usia menggunakan mobil odong-odong ke TPS.⁴³

13. Pemilihan Duta KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemilihan duta KPU, dimana duta KPU merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang pemilu. Peserta yang terpilih akan di beri bimbingan tentang pemilu , mulai dari simulasi pencoblosan, penting memilih, dan hal-jhal lainnya yang berhubung dengan pemilu.

Pemilihan Duta KPU Sumsel 2018-2023 yang di gelar oleh Komisi Pemilihan Umum Sumsel bekerjasama dengan Zetizen Sumatera Ekpres Ahad (13/5/2018) di Mall Palembang Icon. Ketia KPU Sumsel H. Aspahani diwakili sekretariat KPU Sumsel H. M.S Sumaran komisioner divis SDM dan Parmas Ahmad Naafi mengatakan setelah terpilih Duta KPU punya tugas cukup berat. Mereka menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait persoalan memilih. Mereka akan menjadi rujukan, tempat masyarakat

bertanya

dan kew

Heny S



Gambar 3. 7 Pemilihan Duta KPU

Pemilihan duta KPU Sumatera Selatan merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosialisasi KPU terhadap pemilih pemula. Tindak lanjut dari kegiatan goes to campus, KPU goes to school, KPU grebek kampung dan rangkaian sosialisasi lainnya. *“Kita berharap duta KPU dapat menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilihan Gubernur 2018 dan Pemilu 2019”*⁴⁴. Setelah terpilihnya Duta KPU punya tugas cukup berat, mereka menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait persoalan pemilihan.

“Duta KPU adalah cerminan penyelenggara pemilu yang melayani masyarakat dengan hati, mereka akan menjadi rujukan, tempat masyarakat bertanya dan memberi solusi bagi yang mengalami kesulitan terkait hak dan kewajibannya sebagai pemilih.”⁴⁵

44 Herlis Miyanah, Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, wawancara tanggal 23 Mei 2019

45 Herlis Miyanah, Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, wawancara tanggal 23 Mei 2019

Berbekal pengetahuan saat dikarantina, tugas tersebut tidak akan sulit bagi Duta KPU. Mereka telah dibekali secara detail seluk beluk pemilu, tinggal bagi mentransformasi ilmu mereka kepada masyarakat.

Pemilihan duta KPU ini menjelaskan, selain pengetahuan tentang pemilu yang menjadi penilaian utama pada ajang ini, *brain*, *attitude*, dan *action* yang mencerminkan generasi muda yang energik dan cerminan penyelenggara pemilu. Guna menambah pemahaman kepemiluan dan teknis pemilihan, Duta KPU Sumatera Selatan di beri bimbingan Teknik (Bimtek) mekanisme pencoblosan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh KPU Sumatera Selatan di sekretariat KPU Sumatera Selatan.

Sebelum simulasi, para finalis Duta KPU tersebut dibekali materi tentang mekanisme dan perlengkapan pencoblosan oleh komisioner KPU Sumatera Selatan. Komisioner KPU Sumatera Selatan menjelaskan semua masyarakat yang telah mendapat hak pilih, harus membawa surat undangan pencoblosan dan KTP elektronik.

Selesai pencoblosan, lembar C1 atau berkas perhitungan suara harus menjadi perhatian khusus. Bila terjadi perselisihan suara, lembar C1 inilah yang akan menjadi acuan. Data C1 merupakan data paling awal saat perekapan surat suara dari pemilih. Para Duta KPU tersebut langsung melakukan simulasi pemilihan suara, mereka berbagi tugas berperan sebagai tugas KPPS, saksi dan pemantau yang bertugas di tempat pemilihan. Mulai dari pendaftaran pemilih, pencoblosan hingga perhitungan surat suara.

Kegiatan ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan, dengan praktik langsung Duta KPU bisa tahu lebih detail tentang pemilihan. Dalam peneliti Duta KPU peneliti berharap pemilihan duta KPU juga di lakukan di berbagai kabupaten/kota di

Sumatera Selatan supaya bisa lebih mempermudah memberikan informasi kemasyarakat terutama di daerah-daerah susah di jangkau.

14. Sosialisasi Melalui Media Massa

Era digital saat ini sangat mudah untuk berbagai informasi dari satu pihak ke pihak lain, hal ini menjadi salah satu peluang bagi KPU agar semakin dikenal oleh masyarakat. Selain itu tentu memudahkan berbagai segala jenis informasi terkait pemilu kepada masyarakat luas terutama bagi pemilih pemula. Saat ini anak muda lebih tertarik untuk mengakses informasi melalui media sosial. Keuntungan penyebaran informasi melalui media sosial adalah tidak membutuhkan biaya penerbitan yang tinggi, seperti layaknya menerbitkan sebuah iklan di televisi, radio, maupun koran.

Selain biaya yang relatif murah, pemilih pemula cenderung sangat dekat dengan media sosial seperti Facebook, Twiter, Instagram, dan Line. Bahkan dapat dikatakan tidak bisa jauh tanpa adanya media-media sosial tersebut. Sehingga untuk lebih tepat sasaran pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, KPU Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan beberapa media massa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan melalui iklan sosialisasi. Iklan Sosialisasi berisi pemberitahuan tanggal pemungutan suara dan himbauan sukseskan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Rubric tanya jawab “Anda Bertanya KPU Menjawab”, khusus rubric tanyajawab, KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan interkasi dengan pembaca harian tersebut. Permasalahan-permasalahan terkait kepemiluan dari masyarakat dapat diberikan solusinya.

Melihat jumlah pengguna aktif internet di Indonesia yang semakin lama semakin besar, menurut lembaga riset pasar e-marketer, populasi *netter* Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Masyarakat Indonesia pengguna aktif internet dengan capaian tersebut Indonesia peringkat ke 6 negara-negara yang aktif menggunakan Internet.⁴⁶ Dari jumlah internet sebesar 83,7 juta tersebut, 80% diantaranya adalah remaja 15 – 19 tahun dimana pada umur tersebut mereka menyanding sebagai pemilih pemula.

KPU Sumatera Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidaklah tinggal diam dalam menyikapi perkembangan teknologi internet yang ada, untuk mengambil simpatik dan mengedukasi anak muda tentang kepemiluan dan pentingnya menggunakan hak pilihnya KPU menggunakan media internet untuk mengedukasi mereka. Sebab anak muda saat ini cenderung lebih banyak mendapatkan informasi melalui internet dengan *smartphone* mereka.

Anak muda tidak lagi antusias dengan informasi yang disajikan di media televisi, maupun cetak dan radio, sebab dengan *smartphone* masyarakat sekarang dapat mengakses informasi kapan dan dimana saja. Penggunaan media sosial dalam metode sosialisasi telah diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota pada pasal 9

Komisi pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan dalam praktiknya menggunakan media sosial untuk memberikan segala sesuatu tentang kepemiluan, baik perkembangan, proses tahapan pemilu maupun hasil pemilihan umum. Komisi

46 Kemkominfo RI (2014). Kemkominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 83,7 juta. Tersedia: https://kominfo.go.id/sorotan_media (22 Mei 2019; 12.36 WIB)

Pemilihan Umum mempergunakan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat umum seperti, media sosial twitter, Instagram, line dan akun facebook.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak M. Rais, S.Sos., M.PA selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas *“Jadi kita melakukan sosialisasi dari segala lini termasuk dimedia sosial untuk Twiter, Facebook, Intagram, Line karena pengguna media sosial saat ini kebanyakan pemilih pemula”*.⁴⁷

Peneliti berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan bisa lebih banyak lagi memberikan informasi pemilu di media, terutama media sosial. KPU Provinsi Sumatera Selatan juga bisa bekerjasama dengan akun-akun yang banyak pengikutnya untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. KPU bisa bekerja sama dengan akun @plglipp, @palembangterkini, @palembangupdate, dan akun lainnya yang banyak pengikutnya sehingga mudah lihat oleh masyarakat yang menggunakan media sosial .

15. Sosialisasi melalui Media Elektronik

Penyebaran informasi tentang pemilu pada media-media konvensional juga perlu karena eksistensinya tidak seperti dahulu, media konvensional tetap diminati masyarakat. Sehingga KPU tidak hanya melakukan sosialisasi melalui akun media-media sosialnya tetapi juga melakukan sosialisasi melalui radio-radio, koran, televisi.

KPU Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan berbagai Stasiun Televisi dalam wilayah Sumatera Selatan untuk pembuatan iklan dan tayang iklan sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018. Kerjasama dengan TVRI Sumatera Selatan selaku televisi pemerintahan gencar dilakukan, kegiatannya

47 M. Rais, Kasubbag Teknis dan Hupmas, Wawancara tanggal 19 Maret 2019

antara lain penyiaran tayangan debat *public, countdown* (hitung mundur) hari H pelaksanaan dan lain sebagainya.

Selain melalui TV, siaran radio menjadi media berikutnya untuk menayangkan iklan dan pesan *voice* (suara) untuk menghimbau kepada masyarakat turut serta mensukseskan Pilkada dan penggunaan hak pilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.

- a. Pal TV (Iklan sosialisasi pindah memilih tayang tanggal 1 s/d 17 Maret 2019)
- b. Pal TV (Iklan layanan masyarakat Ayo Sukseskan Pilpres dan Pileg 2019 45 Spot, tayang tanggal 4 Maret s/d 17 April 2019)
- c. Sriwijaya TV (Iklan sosialisasi Pemilu 2019, ajakan untuk menyukseskan pemilu 2019, 46 spot tayang pada tanggal 4 Maret s/d 16 April 2019)
- d. TVRI Sumatera Selatan (Iklan PSA Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, 76spot, sambutan KPU, Kapolda, Gubernur, Bawaslu, berisi himbauan sukseskan pemilu 2019 tayang pada tanggal 4 Maret s/d 16 April 2019)
- e. TVRI Sumatera Selatan (Iklan PSA KPU Provinsi Sumatera Selatan berisi Animasi pindah memilih, 50 spot, tayang pada tanggal 4 Marets/d 16 April 2019)

Dari data peneliti dapat, peneliti berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan bisa lebih banyak lagi bekerjasama dengan media elektronik, dan menyiarkan sosialisasi dengan waktu yang cukup lama. Sehingga masyarakat bisa melihat terus sosialisasi tersebut dan membuat mereka sadar bahwa suara mereka sangat penting untuk menentukan pemimpin di masa depan.

16. Sosialisasi melalui Pemasangan Alat Peraga dan Penyebaran Bahan

Sosialisasi selanjutnya yaitu melalui penyebaran bahan tentang sosialisasi, dimana penyebaran bahan tentang pemilu sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Alasan KPU Provinsi Sumatera Selatan karena penyebaran bahan-bahan ini cukup praktis karena bisa langsung di kasih ke masyarakat dan langsung bisa dibaca atau lihat masyarakat secara langsung.

Dalam sosialisasi tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, KPU Provinsi Sumatera Selatan membuat baju kemeja KPU Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 103 buah, sebanyak 1000 buah, *Paper Bag* sebanyak 1000 buah, buku visi misi Paslon 500 buah, kalender dinding sebanyak 400 buah, kalender duduk sebanyak 400 buah, *branding* Mobil Pintar Pemilu Sriwijaya yang merupakan hasil bantuan dari Bank Mandiri Tbk untuk memunjang kegiatan sosialisasi sebanyak 1 buah, baju kaos oblong sebanyak 2000 buah, payung sebanyak 2000 buah, pena sebanyak 2000 buah, handuk sebanyak 2000 buah, jam dinding sebanyak 2000 buah, boneka Cek Am Pera sebagai maskot Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 berpasangan exclusive sebanyak 400 buah, bantal leher sebanyak 2000 buah, topi sebanyak 2000 buah dan buku profile pasangan calon sebanyak 2000 buah.

Dari hasil yang di dapat peneliti, peneliti berharap KPU bisa lebih efektif dalam penyebaran bahan-bahan yang berhubungan dengan pemilu. KPU juga bekerja sama dengan masyarakat atau kaum milenial yang bisa membantu menyebarkan bahan-bahan

tersebut. Bahan-bahan tersebut bisa di sebar di jalan, tempat umum, atau tempatnya mudah di jangkau lainnya. Karena tidak banyak masyarakat yang bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke kegiatan sosialisasi yang di lakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

17. Sosialisasi Media Cetak

Sosialisasi selanjutnya dilakukan dengan memasang berbagai media cetakan salah satunya spanduk. Alasan KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi karena sosialisasi tersebut yang paling efektif dan efisien karena mudah dilihat oleh masyarakat langsung terutama spanduk yang di pasang di jalan umum. Secara tidak langsung masyarakat bisa melihat spanduk tentang pemilu.

1) Pilkada Serentak 2019

Sebagai Instrumen dalam kegiatan sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, KPU Provinsi Sumatera Selatan menyebarkan pesan-pesan sosialisasi melalui barang cetakan berupa Billboar (ingat 27 Juli 2018, Datang ke TPS tentukan Pilihanmu, 4 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018) dengan lokasi:

- a. Jln. KH. Azhari Kertapati Palembang
- b. Jln. Lintas Palembang – Lampung Ogan Komering Ilir
- c. Jln. Lintas Palembang Jambi Simpang Pasar Sungai Lilin Muba
- d. Tanjung Siapi-api Simpang Bandara
- e. Simpang 4 Polsek Sekayu

- f. Simpang Talang Keramat Banyuasin
- g. Jln. Lintas Sumatera Dekat Pasar Indralaya

2) Pemilu Serentak 2019

- a. Sosialisasi tahapan hari pemungutan suara pemilu tahun 2019 2 bulan (CV. Rhema Advertising)
 - Simpang Talang Pangerang Kabupaten Ogan Komering Ilir, ukuran 4m × 6m (vertikal)
 - Jalan Lintas Palembang Jambi Pasar Betung Kabupaten Banyuasian, ukuran 4m × 6m (vertikal)
- b. Sosialisasi hari pemungutan suara pemilu tahun 2019 selama 2 bulan (CV Citra Sriwijaya ADV)
 - Jalan Simpang Guru-guru / Simpang Masjid Agung Palembang, ukuran 4m × 6m (vertikal)



Gambar 3. 8 Spanduk Mengajak Ke TPS

Selain sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menyisir pemilih pemula, serta beberapa baliho lainnya hingga pemilih disabilitas. KPU Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan sosialisasi media cetak. Di lakukan sosialisasi ini agar meningkatkan partisipasi pemilih melalui spanduk. Bahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan juga sudah menyebar spanduk atau baliho yang berisikan waktu pencoblosan, serta ajakan untuk datang ke TPS. Kemudian juga jadwal tahapan kampanye dan proses tata cara syarat pemilih dan proses yang bisa dilakukan bagi pemilih pindahan.

Sosialisasi melalui baliho yang disebar di tempat umum, terutama jalan umum dapat membantu mengingatkan masyarakat sebagai pemilih untuk dapat datang ke TPS dalam hal memberikan hak suaranya. Baliho di pasang ditempat yang strategis agar benar-benar bisa diketahui dan dilihat masyarakat.

Dari hasil yang di dapat peneliti, peneliti berharap spanduk atau media cetak lainnya yang di pasang KPU Provinsi Sumatera Selatan bisa di pasang di tempat yang mudah dilihat masyarakat, dan memasang ke tempat yang jangan merusak lingkungan misalnya dipohon-pohon ataupun di tembok-tembok.

18. Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya

Rumah pintar pemilu Sriwijaya adalah sebuah fasilitas dari KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk masyarakat yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran tentang segala sesuatu pemilu. Rumah pintar pemilu terbuka untuk umum dan juga terbuka untuk organisasi-organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang ingin belajar tentang kepemiluan, dan juga bagi para pelajar dan mahasiswa yang statusnya masih pemilih pemula. Di rumah pintar pemilu terdapat maket-maket tatacara pemilihan di TPS, sejarah KPU, dan sebagainya.

Wawancara dengan Faizah Lutfiana mahasiswa Fisip Uin Raden Fatah Palembang yang pernah mengunjungi Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya pada acara PBAK Fakultas Fisip yang dilaksanak di KPU Provinsi Sumatera Selatan

“Mereka mengedukasi tentang pemilu dan politik di Indonesia, di rumah Pintar fasilitasnya lengkap mulai dari sejarah pemilu, demokrasi, profil mantan gubernur, dan hal bersangkutan dengan pemilu lainnya. Rumah Pintar sangat bermanfaat bagi masyarakat di rumah pintar sangat lengkap tentang perpolitikan dan pemilu. Di rumah Pintar mahasiswa dapat referensi-referensi untuk penulisan penelitian terutama tentang Pemilu, anggota KPU Provinsi akan menjelaskan tentang demokrasi, pemilu dan fungsi KPU kepada masyarakat yang berkunjung. Kedepan saya berharap KPU.”⁴⁸

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan merupakan KPU pertama di Indonesia yang memiliki rumah pintar pemilu yang bernama Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya. Rumah pintar Pemilu adalah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk seluruh program aktivitas project edukasi masyarakat. Peresmian Rumah Pintar Pemilu dilakukan secara simbolis, Jumat (27/11/2015) oleh Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas didampingi Hadar Navis Gumay.

48 Faizah Lutfiana, mahasiswa Fisip, Wawancara tanggal 1 Mei 2019

Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya merupakan bagian dari strategi program pusat pendidikan pemilih yang bertujuan untuk peningkatan partisipasi, peningkatan literasi politik dan peningkatan kerelawanan (voluntaritas). Menurut komisioner KPU Sumatera Selatan Ahmad Naafi SH MKn, berdirinya pusat pendidikan pemilih yang dipusatkan di Gedung KPU Provinsi Sumatera Selatan ini dilatarbelakangi beberapa alasan di antaranya untuk membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik, meningkatkan partisipasi politik, meningkatkan kualitas partisipasi pemilih dan memperkuat sistem demokrasi.

Pembangunan Pusat Pendidikan Pemilih ini dimulai sejak awal Oktober 2015 hingga akhir November 2015 dari dana bantuan APBD 2015 dan APBN 2015. Dua kabupaten di Sumatera Selatan yang juga menjadi pilot Project Pusat Pendidikan Pemilu di Indonesia yaitu KPU Kabupaten Ogan Ilir dan KPU Kabupaten OKU Timur juga sedang menjalani proses pembangunan.

Terdapat dua kelompok kluster pemilih yang menjadi kelompok sasaran dalam Pusat Pendidikan Pemilih “Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya” ini yaitu kelompok pemilih strategis yaitu kelompok pemilih yang karena besaran ataupun posisi strategis yang terbagi dalam pra pemilih, pemula, perempuan, marginal, penyandang disabilitas, dan agamawan. Sedangkan kelompok rentan yaitu sejumlah daerah atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan pemilu memiliki masalah secara berkesinambungan ataupun acak (random).

Masalah ini dapat secara khusus terkait dengan partisipasi pemilih maupun penyelenggara pemilu secara umum. Masalah yang terjadi pada daerah ataupun

kelompok masyarakat itu dapat mengganggu penyelenggara pemilu dan legitimasi pemilu. Kluster ini terbagi dalam daerah dan kelompok masyarakat dengan partisipasi pemilih yang rendah, potensi pelanggaran pemilu tinggi serta daerah rawan konflik dan kekerasan.

Peneliti mengamati secara langsung bagaimana kegiatan tersebut, karena peneliti pernah datang ke rumah pintar pemilu sriwijaya yang ada di KPU Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan bisa bekerjasama dengan kampus, sekolah, atau masyarakat yang berpengaruh supaya bisa mengunjungi rumah pintar pemilu Sriwijaya.

19. Sosialisasi Pindah Memilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan menggelar sosialisasi pindah memilih dalam pemilu 2019 kepada peserta. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dalam pengurusan pindah memilih bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak memilihnya di TPS asal pada saat pencoblosan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 348 ayat (1), pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, salah satunya pemilih KTP-el yang terdapat pada daftar (DPTb). Pemilih DPTb ini dikategorikan

apabila

sehingga

memilih

The poster is red and white. At the top, it features the KPU logo and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM'. Below that, in large white letters on a red background, is 'PINDAH MEMILIH'. Underneath, in smaller white text, are the reasons: 'KARENA SAKIT', 'TERTIMPA BENCANA ALAM', 'MENJADI TAHANAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA', and 'MENJALANKAN TUGAS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA'. The bottom section is white with the text 'DIPERPANJANG SAMPAI DENGAN 10 APRIL 2019' and 'SEGERA KE KPU KABUPATEN/KOTA'. At the very bottom, it says 'RABU 17 April 2019 AYO KE TPS 07:00 - 13:00'. There is also a small source note at the bottom: 'Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XV/2019 dan Surat Edaran KPU Nomor 577/PL.023-SD/05/KPU/2019'.

anh

Gambar 3.9 Player Sosialisasi Pindah Memilih

20. Lomba Band Musik *Jingle* Pemilu

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan angka partisipasi pemilu tahun 2019.. Daftar Group Band yang menjadi juara pada lomba Festival band Jingle Pemilu 2019 adalah Juara Pertama Friendship, juara kedua Emeral'd, juara ketiga An Sembel dan juara Favorite Mr. Giant.

Dalam kegiatan tersebut peneliti langsung mengikuti kegiatan dan mengamati secara langsung, kegiatan tersebut di adakan langsung di halaman KPU Provinsi Sumatera Selatan. Banyak band dari Palembang bahkan di luar kota Palembang yang menjadi peserta lomba band Musik Jingle Pemilu. Kegiatan tersebut menarik perhatian terutama band-band yang ada di kota Palembang dan di luar Kota Palembang karena dilihat dari banyak peserta yang mengikuti lomba tersebut.

Peneliti juga berharap supaya kegiatan tersebut dilakukan di tempat yang jangan terlalu jauh dari kota karena kalau dilakukan di halaman KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak terlalu banyak masyarakat yang melihat kegiatan tersebut karena terlalu jauh.

21. Lomba Mural Pemilu Serentak 2019

Sosialisasi melalui menggelar lomba mural yang bertema tentang pemilu, sosialisasi ini berisi ajakan agar masyarakat memilih pada saat pemilu, khususnya generasi muda agar jangan sampai golput. Lomba ini diadakan untuk mengapresiasi para pembuat mural khususnya yang ada di Sumatera Selatan.

Lomba Mural di selenggarakan oleh setiap satker KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Penyelenggara lomba dimulai pada minggu kedua bulan Februari sampai dengan minggu ketiga bulan Februari 2019. Desain dan hasil karya seluruh peserta dapat digunakan untuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu 2019 sampai dengan 31 April 2019, tempat pelaksanaan kegiatan adalah tembok atau dinding-dinding yang berada di tempat-tempat umum strategis yang dapat dilihat oleh orang banyak. Tema yang diangkat dalam pelaksanaan Lomba Mural Pemilu 2019 diantaranya:

- 1) Ajakan memerangi Hoax Pemilu
- 2) Ajakan anti golput, anti politik uang dan anti politik sara
- 3) Ajakan untuk memilih di TPS, tanggal 17 April 2019

Peneliti berharap anak muda yang berdarah seniman bisa mengikuti kegiatan tersebut, sehingga dengan kultur masyarakat yang cepat menangkap sebuah ajakan,

maka himbauan tersebut disampaikan dengan baik. KPU Provinsi Sumatera Selatan juga harus bekerjasama dengan anak-anak berdarah seni supaya bisa mengajak teman-teman lainnya, KPU juga harus memilih tema yang menjunjung nilai-nilai kebaikan. Seperti yang dilakukan KPU bali menggunakan tema ikon pewayangan dimana memiliki peran representatif dari masyarakat.⁴⁹

22. Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat

Konser musik pemilih berdaulata negara kuat dalam rangka sosialisasi tahapan pemilu yang menghadirkan artis lokal dan arti ibukota. Kegiatan ini merupakan bagian dari bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih.

Dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 di Kambang Iwak Palembang. Peserta konser adalah 3 group pemenang lomba jingle pemilu yang akan mengisi konser tersebut dengan lagu jingle dan lagu bebas, akan ada flash mob dan bintang tamu (artis Rara dan artis lokal). Mc yang dipilih untuk mengiai acara konser adalah Yai najib dan Bic Cik Waya-waya pada acara konser tersebut akan diadakan penyerahan hadiah Lomba Mural kepada para pemenang.

Pada kegiatan tersebut KPU Provinsi Sumatera Selatan mengamati secara langsung proses kegiatan tersebut. Dari pengamatan peneliti ada salah satu calon secara tidak langsung mempromosikan dirinya sebagai calon pada kegiatan yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan di Kambang Iwak. Peneliti

49 <https://kumparan.com>

berharap KPU Provinsi Sumatera Selatan bisa menasehati calon tersebut karena itu merupakan salah satu pelanggaran karena kampanye secara tidak langsung

23. Relawan Demokrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi membentuk Relawan Demokrasi untuk pemilu 2019 di seluruh Indonesia. Beberapa KPU daerah juga tengah melakukan penyeleksian relawan demi sebarakan pengetahuan soal pemilihan umum pada 17 April. Pembentukan relawan demokrasi tertuang dalam peraturan KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019.

Sementara dalam lampiran Surat KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tanggal 9 Januari 2019, perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak tahun 2019, menjelaskan tugas Relawan Demokrasi sebagai subjek yang melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih. Pembentukan relawan demokrasi pada setiap kabupaten /kota dibatasi 55 orang bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dan menurunkan angka suara tidak sah. Terutama pemilu serentak 2019 ada lima jenis surat suara, yakni untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Relawan demokrasi melakukan tugas dengan turun ke wilayah sebarannya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa yang telah dijalankan oleh KPU, serta menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Selain itu,

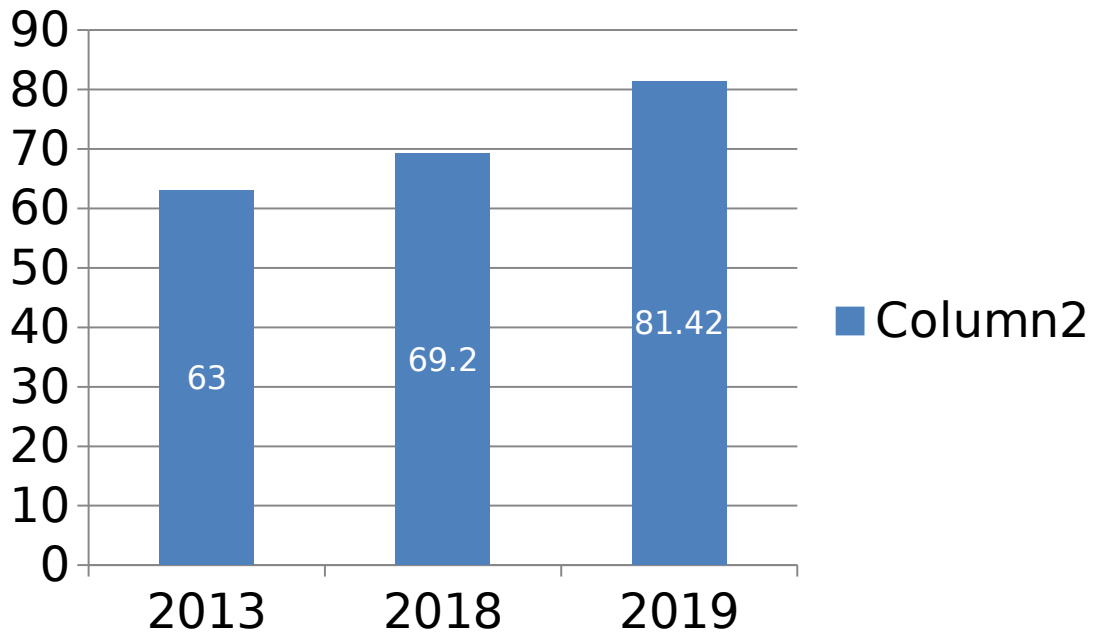
Relawan Demokrasi juga membantu menginformasikan kepada masyarakat terkait waktu penyelenggaraan pemilu 2019 di tingkat bawah.

Relawan demokrasi terdiri dari berbagai elemen, mulai dari pemuka agama, pemuda, perempuan, hingga penyandang difabel. Tugas relawan demokrasi menyampaikan informasi tentang pemilu, pendataan pemilih, pindah memilih, jenis surat suara, dan cara menyoblos. Selain itu relawan demokrasi juga di tugaskan mendidik pemilih mengenai penggunaan hak pilih secara bijak. Pembentukan relawan demokrasi diharapkan dapat mengurangi angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu 2019.

Hasil peneliti yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat telah melakukan 350 kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi. Masing-masing kegiatan dilaksanakan 9 kali pada 2016, 91 kali pada 2017, 100 kali pada 2018, dan 150 kali pada 2019, pendidikan pemilih dan sosialisasi telah dilakukan di daerah yang ada di Sumatera Selatan.

KPU Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai peningkatan dari Pilkada 2013 jumlah partisipasi politik masyarakat 63%, Pilkada Serentak 2018 partisipasi politik masyarakat 69,20%, dan di Pemilu Serentak 2019 mencapai 81,42%, dari hasil ini KPU Provinsi Sumatera Selatan menyatakan belum puas dengan hasil itu. Tetapi setidaknya upaya yang telah dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan sudah menunjukkan hasil yang mengembirakan dimana dari Pilkada 2013 sampai Pemilu Serentak 2019 ada peningkatan.

Grafik 3.1
Jumlah Partispasi Pemilih di Sumatera Selatan



Dari tahun 2013 ke 2018 terdapat peningkatan sebesar 6,2% Atau terdapat peningkatan sebesar 1,24% pertahun, Sedangkan dari tahun 2018 ke 2019 terdapat peningkatan sebesar 12.22% hanya dalam waktu 10 bulan saja (Pilkada Serentak Juli 2018 dan Pemilu Serentak di bulan April 2019). Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partispasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 peneliti menyimpulkan bahwa dari tahun 2013 ke 2018 terdapat peningkatan sebesar 6,2% atau terdapat peningkatan sebesar 1,24% pertahun, Sedangkan dari tahun 2018 ke 2019 terdapat peningkatan sebesar 12.22% hanya dalam

waktu 10 bulan saja (Pilkada Serentak Juli 2018 dan Pemilu Serentak di bulan April 2019). Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan.

Dengan demikian upaya yang telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui dua kegiatan utama yaitu Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu telah berhasil. Keberhasilan ini berdampak pada meningkatnya legitimasi politik dari pemenang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 dan semakin memperkuat dasar-dasar kekuasaan dan demokrasi di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh teori legitimasi Max Weber.

B. Saran

1. KPU Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi pemilu sampai ke tingkat desa secara merata, agar seluruh masyarakat bisa merasakan dan mengetahui secara langsung informasi tentang pemilu.
2. KPU dalam meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pemula harus melakukan ke lebih banyak perguruan tinggi. Di Sumatera Selatan ada 100 perguruan tinggi akan tetapi KPU hanya melaksanakan sosialisasi kepada 6 perguruan tinggi yaitu Universitas IGM Palembang, STISIPOL Candradimuka, Taman Siswa Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Sriwijaya Indralaya, Universitas Bina Darma, Universitas Muhammadiyah, Universitas Sriwijaya Palembang.

3. Untuk kedepannya mengenai sosialisasi KPU bukan hanya sekedar wacana yang tertulis, KPU harus menindaklanjuti mengenai Implementasi. Terutama untuk Penyandang Disabilitas dan pemilih lanjut usia yang harus mempunyai TPS khusus dan fasilitas.
4. KPU bekerjasama dengan media massa serta kelompok masyarakat sipil perlu terus mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri dan melaporkan jika terjadi kesalahan pendataan pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andrew Heywood. (2014)., *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Andreas Anter, (2014), *Max Weber Theory Of The Modern State*, Terjemahan edisi jerman: Badan Lisensi Hk Cipta

C.R Kothari, (1990). *Research Methodologi, Methods adan Techniques (Second Revises Edition)*, India: Age International

David Beetham, kevin Boyle, (2000), *Demokrasi*, Jogjakarta: Kanisius

- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Muhadam Labolo. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Ikrar Mandriabadi
- Mufti, Muslim., Didah Durrotum Naafisah, (2013). *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia
- Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Restra KPU Provinsi Sumsel 2015-2019
- KPU Provinsi Sumatera Selatan, (2018) “Mengukir Sejarah Kepemimpinan Sumatera Selatan”, Edis VI, KPU Sumsel
- KPU Provinsi Sumatera Selatan
- KPU Provinsi Sumatera Selatan, (2018), *Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih KPU Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang: KPU Provinsi Sumatera Selatan
- KPU Provinsi Sumatera Selatan, (2018), “*Mengukir Sejarah Kepemimpinan Sumatera Selatan*”, Edis VI, Palembang: KPU Sumatera Selatan
- Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2018

Jurnal Elektronik :

- David Easton, (1972). *A System Analysis of Political*, New York : John Wiley and Sons
- James A Gardner, (1990), *Consent, Legitimacy and Elections: Implementing Popular Sovereignty Under the Lockean*, Buffalo: University at Buffalo School of Law

- Maya Yuliantina, (2016), *Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Bandar Lampung: Universitas lampung
- Muhammad Akbar, (2016), *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa*, Makasar: Universitas Hasanuddin
- M. Yusuf A.R, (2010), *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*, Jurnal Ganec Swara, Vol. 4, No, 1
- Nicolas Hariyanto, (2018), *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*, Medan: Universitas Sumatera Utara
- Novendi Setiawan, (2015), *Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Nursam, (2016), *KeKuataan Politik Pemimpin Adat Uwa' Tolotang Pada Pemilihan Kepala Kepala Daerah Sidrap Tahun 2013*, Makasar: Universitas Hasanudin
- Seymour martin Lipset, (1969). *Political Man: The Social Bases of Political*, Bombay: Vakils, Feffer dan Simons Private Ltd
- Tauchid Noor, (2019) *Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi , Vol . 11, No. 1, 2
- Political legitimacy, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 29 April 2010

Undang-undang :

- Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum
- Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
- Keputusan KPU 67 tahun 2003

Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota

Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/kota

Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2010 tentang uraian tugas staf pelaksanaan pada sekretariat jenderal KPU , sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota

Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU

Peraturan KPU Nomor 08 tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum

Peraturan Presiden N0.3 Tahun 1960 tentang pembubaran dewan konstituante

Peraturan KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi pemilihan umum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan yang berhak mengikuti pemungutan suara TPS, salah satunya pemilihan KTP-el yang terdapat pada daftar (DPTb)

Situs Internet:

<https://pemilu.kompas.com>

<https://megapolitan.kompas.com>

<https://kominfo.go.id>> sorotan_media

<https://kumparan.com>